



DEPARTEMEN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

F U T U R E S  K O N T R A K

BERJANGKA

MENGABDI DENGAN INTEGRITAS

SRG Menggenjot ■
Sektor Agro

Jelang ■
Lelang CPO



Ketika
Pajak
Tak Berpihak

SETELAH sekitar sembilan tahun 'numpang' di gedung sewaan, akhirnya Bappebti memiliki gedung sendiri. Terhitung sejak 1 April 2009, Bappebti menempati gedung Departemen Perdagangan di Jalan Kramat Raya No. 172, Jakpus. Sedangkan proses perpindahan ke gedung baru itu, sejak penghujung bulan Maret 2009 para staf Bappebti sudah disibukan aksi pindah-pindah.

Semula gedung ini digunakan Badan Pengembangan Ekspor Nasional (BPEN), dan kini BPEN pun telah bergabung di Kantor Pusat Departemen Perdagangan.

Dan, sebagai tanda syukur kepada Tuhan memiliki gedung baru, keluarga besar Bappebti menyelenggarakan doa dan syukuran pada 6 April 2009.

Pembaca yang budiman, Buletin Berjangka edisi April 2009, ini, mengangkat keluhan dan kecemasan para pelaku perdagangan berjangka komoditi atas kebijakan pemerintah yang mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 17/2009. Yakni tentang peraturan pajak penghasilan atas penghasilan dari transaksi derivatif berupa kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa berjangka. Di dalam peraturan itu, transaksi derivative dipatok kena pajak sebesar 2,5 persen. Dan ketentuan ini pun diberlakukan terhitung sejak 1 Januari 2009.

Sesungguhnya apa yang mencemaskan para pelaku pasar dari kebijakan itu? Dari wacana yang berkembang dikalangan pelaku usaha perdagangan berjangka, terlontor keluhan yakni pajak derivative tidak sepatasnya dikenakan dari dua sisi. Maksudnya, saat beli dan jual. Jika saat dijual menguntungkan, para pelaku pasar perdagangan berjangka jelas tidak keberatan dikenakan pajak. Tetapi bagaimana saat dijual merugi? "Itu ibaratnya sudah jatuh tertimpa tangga pula."

Protes akan kebijakan itu pun sudah dilayangkan pelaku pasar perdagangan berjangka pada pemerintah, khususnya ke Direktorat Pajak. Tapi agaknya, pihak Direktorat Pajak tetap kekeh dengan kebijakan itu. Meski secara resmi belum menjawab surat keberatan dari pelaku pasar perdagangan berjangka itu. Itulah kondisinya saat laporan ini disusun.

Hal lain yang membuat para pelaku pasar 'diketok' perasaannya, adalah tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan rencana penerbitan peraturan tersebut.

Namun, terkait dengan persoalan yang membelit para pelaku perdagangan berjangka tanah air itu, ada kabar baik yang datang dari Bappebti. Kepala Bappebti, Deddy Saleh, sudah direncanakan beraudiensi dengan Direktorat Pajak untuk membahasnya. Semoga saja pertemuan itu membawa angin segar bagi industri perdagangan berjangka. Salam! ▲



6 FOKUS

Aturan Main Pasar Lelang Forward



16 KOMODITI

Jahe Bekal Awak NASA



28 KIPRAH

Hartono Wignjoprano: Wujudkan Pasar Induk Modern di Banten



Analisa9
 Harga Gula Semakin Melemah

Aktualita10-11
 - Bappebti Boyongan ke Kramat Raya
 - Comprehensive Economis Partnership Agreement: Pengembangan Perdagangan Berjangka Indonesia - India
 - Deklarasi Gunakan BAKTI
 - BBJ Gelar Simulasi Berhadiah

Resi Gudang..... 12-13
 Mengenjut Sektor Agro Melalui Instrumen SRG

Agenda Foto 14-15

Outlook19
 Gold Standard Fans Yearn for Great Depression

Market21
 - Cengkih "Hilang" di Pangkal Pinang
 - Harga Gandum Merangkak Naik

Berjangka..... 22-23
 Jelang Pasar Lelang CPO

Wawasan 24-25
 Akar Krisis Global

Kolom 26-27
 Pajak Atas Transaksi Derivatif
 Perlakuan Sama Terhadap Semua Subjek dan Objek Pajak



Penerbit: Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi **Penasehat/Penanggung Jawab:** Deddy Saleh
Pemimpin Redaksi: Chrisnawan Triwahyuardhianto **Wakil Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Natalius Nainggolan
Dewan Redaksi: Yusuf Affandi, Lili Yuliana S, Dian Sandita Arisanti, Suhendro, Ambre Satria P, Sri Sundayani, Poppy Juliyanti
Sirkulasi: Sapin Siswanto, Katimin **Alamat Redaksi:** Gedung Bappebti Jl. Kramat Raya No. 172, Jakarta Pusat,
 Telp. 021. 319 24744 (hunting). www.bappebti.go.id

Redaksi menerima artikel ataupun opini dikirim lengkap dengan identitas serta foto ke E-mail: berbakti@bappebti.go.id

Ketika

Pajak Tak Berpihak

Peraturan Pemerintah No. 17/2009, yang diluncurkan 9 Februari 2009, lalu, langsung “menggetarkan” bisnis perdagangan berjangka. Segenap pihak dari bisnis di ladang ini merasa begitu perlu untuk mengkhawatirkan peraturan tersebut. Bukan hanya akan berdampak terhadap kematian bursa, tetapi juga akan lebih menyuburkan transaksi gelap yang makin marak saat ini. Tapi tenang, ada usulan dari Mendag kepada Menkeu.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17/2009 memuat tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari transaksi derivatif berupa kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa. Dimana pajak penghasilan yang dipungut bersifat final. Dasar pengenaan adalah margin awal yang ditarik oleh lembaga kliring dengan tarif sebesar 2,5 persen. Sementara pihak Lembaga Kliring ditetapkan sebagai instansi yang melakukan wajib pungut, wajib setor dan wajib lapor. Juklak pemungutan, penyeteroran dan pelaporan ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan. PP berlaku surut mulai 1 Januari 2009.

Menurut Dirut PT Bursa Berjangka Jakarta (BBJ), Hasan Zein Mahmud, akan ada dua implikasi langsung dari PP tersebut. Pertama, transaksi derivatif di bursa akan mati. Kedua, transaksi pasar gelap akan semakin marak. Karena pokok persoalan terletak pada tarif

yang terlalu tinggi, sehingga transaksi derivatif di bursa tidak lagi layak secara ekonomis.

“Beban pajak yang ditetapkan dalam PP 17 Tahun 2009, merupakan dosis racun yang lebih dari cukup untuk membunuh transaksi derivatif di bursa.!” Kata Hasan.

Hasan juga menganggap pihak Ditjen pajak kurang memahami kondisi bisnis perdagangan berjangka. Apalagi peraturan tersebut dikeluarkan tanpa berkoordinasi atau melibatkan pihak perdagangan berjangka untuk dimintai pendapatnya. Sehingga terkesan mentah atau salah kaprah. Dia pun menyesalkan lambatnya respon Ditjen Pajak menanggapi surat dari pihaknya untuk melakukan pertemuan demi mendiskusikan mengenai PP No. 17/2009 tersebut.

Sebelumnya, meski peraturan tersebut sudah secara resmi dikeluarkan tetapi pihak manajemen BBJ dan para

pialang bursa berjangka memang tidak begitu saja menyerah. BBJ waktu itu menyatakan akan meminta Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) untuk membahas kembali pajak ini bersama Ditjen Pajak. "Kami masih akan merumuskan pemikiran dan argumentasi untuk disampaikan ke Ditjen Pajak," ujar Hasan waktu itu. Maka melayanglah surat kepada pihak Ditjen Pajak tersebut. Sayangnya, saat dikonfirmasi **Bulletin Berjangka** pada pertengahan Maret lalu, Hasan mengaku belum mendapat respon seperti yang diharapkan. Padahal saat itu, surat yang dilayangkan sudah sekitar dua minggu lamanya.

Rupanya, Kepala Bappebti Deddy Saleh juga membenarkan belum adanya respon dari pihak Ditjen Pajak terhadap surat yang telah dikirimkan tersebut. Menurut Deddy, pihak industri perdagangan berjangka sama sekali tidak dimintai masukan dalam menyiapkan ketentuan tersebut. Deddy sendiri mengkonfirmasi jika ada usulan perluasan cakupan PPH masuk dalam surat yang dikirimkan Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu kepada Menkeu Sri Mulyani. Mendag pada dasarnya setuju jika SPA dikenakan pajak, tetapi besaran angkanya sama dengan pasar modal atau sebesar 0,1 persen untuk dua sisi dan tidak diberlakukan mundur.

Disebutkannya, usulan itu diantaranya tarif PPH final sebesar 2,5 persen dari margin awal diturunkan dan disamakan dengan pasar modal yaitu sebesar 0,1 persen untuk dua posisi transaksi yaitu 0,05 persen untuk posisi jual dan 0,05 persen untuk posisi beli. Mendag juga mengusulkan PPH itu berlaku efektif 1 bulan setelah penetapan PPH final atau tidak berlaku surut. Karena membutuhkan waktu sosialisasi kepada nasabah pembayar pajak.

Mendag dalam suratnya juga mengungkapkan, jika pengenaan pajak sebesar 2,5 persen yang dihitung dari margin awal tersebut memang berisiko mematikan industri perdagangan berjangka yang baru berkembang selama



Dirut BBJ, Hasan Zein Mahmud

8 tahun. Depdag memperlihatkan komitmennya terhadap pengembangan dan kelangsungan industri tersebut.

Bikin Mati

Lebih jauh dijelaskan Hasan Zein Mahmud, perdagangan berjangka yang terorganisasikan di bursa, memberikan tiga manfaat. Pertama, menyediakan referensi harga terhadap subjek komoditas (underlying asset) yang ditransaksikan. Perdagangan berjangka merupakan mekanisme yang memberikan sinyal terhadap kecenderungan harga yang akan datang. Sinyal harga tersebut, merupakan impuls yang menggerakkan keputusan para pelaku ekonomi. Selanjutnya, menyediakan sarana lindung nilai yang paling efisien terhadap risiko yang berasal dari gejolak harga. Dan terakhir, sarana investasi/spekulasi yang lebih mudah dan dengan biaya transaksi yang lebih murah.

"Pada sisi lain, perdagangan berjangka membutuhkan spekulasi. Kita memahami bahwa seorang produsen, misalnya, menginginkan harga produk selalu tinggi dan stabil. Di pihak lain, seorang konsumen selalu menginginkan harga produk konsumsinya rendah dan stabil," beber Hasan.

Berhadapan dengan fakta bahwa

harga selalu berfluktuasi tersebut, dibutuhkan perdagangan berjangka sebagai sarana 'mengasuransikan' risiko yang bersumber dari fluktuasi harga. Dalam konteks itu, maka para spekulasi merupakan perusahaan asuransi yang bersedia menerima pelimpahan risiko dari para hedgers. Uraian tersebut merupakan gambaran secara konseptual bahwa para hedgers tidak mencari keuntungan dari transaksi derivatif. Mereka bersedia membayar premi agar terlindung dari risiko fluktuasi harga. Pada ujung yang lain, para spekulasi adalah pihak yang bersedia menerima limpahan risiko dengan latar belakang harapan keuntungan.

"Dari kacamata spekulasi, dengan demikian, transaksi derivatif adalah zero sum game. *For every winner there is a loser!*" tegas Hasan.

Kalau prinsip keadilan dalam perpajakan masih adalah mengenakan pajak atas penghasilan, tetapi pada saat yang sama biaya untuk memperoleh penghasilan dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak, maka dasar pengenaan pajak derivatif adalah nihil (zero).

"Dari segi teknis perpajakan, saya mengerti bahwa pelaporan hasil transaksi derivatif, seperti juga pada transaksi efek, dalam SPT, akan sangat

melelahkan, karena perputaran transaksi yang sedemikian cepat. Karena itu, pengenaan pajak penghasilan atas transaksi saham di bursa efek sebesar 0,1 persen dari nilai jual, dan bersifat final, dapat dipahami” terangnya lagi.

Dan pengenaan pajak penghasilan sebesar 2,5 persen dari margin awal untuk transaksi derivatif di bursa, bagi Hasan sangat kontraproduktif karena beberapa alasan. Diantaranya, dasar pengenaan adalah margin awal. Margin awal berfungsi sebagai performance bonds sekaligus initial investment. Menjadikan margin awal sebagai dasar pengenaan pajak, seperti membebankan pajak atas deposito dengan menggunakan pokok simpanan - dan bukan bunga - sebagai dasar pengenaan pajak. Mengambil analogi pajak penghasilan atas transaksi efek, dasar pengenaan yang “salah kaprah” itu dapat diterima dengan kompensasi tarif yang rendah.

Sebagai bentuk penjelasan yang lain, Hasan juga memaparkannya melalui suatu ilustrasi. Kata dia, para spekulasi transaksi berjangka berorientasi keuntungan jangka pendek yang besarnya diukur dengan tick transaksi. Nilai satu tick itu paling banter 1 persen dari margin awal. Mengenakan tarif 2,5 persen atas potensi keuntungan sebesar 1 persen, dilihat dari kalkulasi ekonomis, tidak masuk akal. Meneruskan analogi asuransi, kita bisa membayangkan apa yang terjadi bila sebuah perusahaan asuransi yang mengambil premi 1 persen dari nilai pertanggungan, harus membayar pajak 2,5 persen dari nilai pertanggungan.

Dan diakuinya, PP tersebut memang tidak eksplisit memasukkan Kontrak Opsi Saham (KOS) sebagai derivatif. Kalau KOS juga masuk dalam lingkup PP, maka nasibnya akan sama. Seorang call writer yang konservatif akan menyediakan sahamnya secara penuh (*covered call*) sebagai kolateral/margin. Dus harus membayar 2,5 persen dari nilai saham yang menjadi

kolateral!

Dan ironisnya, Penjelasan Umum PP tersebut justru menyatakan bahwa peraturan tersebut bertujuan untuk mendorong perkembangan bursa yang memperdagangkan instrumen derivatif. Sepanjang menyangkut transaksi derivatif yang terjadi dan/atau didaftarkan di Bursa Berjangka Jakarta (BBJ), ketentuan PP 17 Tahun 2009, memunculkan beberapa loopholes. Diantaranya, transaksi derivatif yang ramai di BBJ adalah transaksi melalui Sistem Perdagangan Alternatif (SPA) yang terjadi di luar Bursa, yang kemudian didaftarkan di BBJ. Sementara, faktanya transaksi bursa untuk komoditas praktis belum berkembang. Karena itu, rumusan PP tidak menyentuh aktivitas jenis ini.

Lalu pihak Lembaga Kliring memungut margin awal setelah ada posisi terbuka, pada akhir hari perdagangan. Dengan demikian, transaksi intraday - beli pagi jual siang - tidak mencatatkan posisi terbuka dan tidak wajib menyetor margin awal. Akibat dari fakta pertama dan kedua tersebut, pajak yang disetor ke Kas Negara adalah 2,5 persen kali nol. Sama dengan nol.

Dalam pendapat Hasan, pengaturan yang lebih optimal bagi pemasukan negara maupun perkembangan bursa membutuhkan revisi PP, minimal menyangkut dasar pengenaan seyogianya transaksi derivatif di bursa dan atau transaksi derivatif di over the counter yang didaftarkan di bursa. Tarif pajak 0,1 persen dari margin awal, berlaku untuk setiap lot yang ditransaksikan- didaftarkan di bursa. Sehingga jumlah yang masuk ke Kas Negara akan jauh lebih besar, dan para pelaku pasar tentu bersedia dan sanggup memikulnya.

Jika memang PP 17 Tahun 2009 benar ditujukan untuk mendorong perkembangan bursa dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, seyogianya beban pajak yang lebih berat harus dipikul oleh transaksi derivatif

yang tidak transparan.

“Off balance sheet, tidak dilakukan di bursa, tidak didaftarkan di bursa, completely unregulated business, no man’s land, untouchable, penuh hanky panky. Untuk yang saya sebut terakhir itu, saya kira, berlaku tarif umum pajak penghasilan. Tapi siapa yang mampu menangkapnya? Yang terjadi kemudian adalah: anak yang patuh dipaksa kelaparan, anak yang nakal dibiarkan mencuri makan!” ungkap Hasan.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Pedagang Berjangka Indonesia (APBI) I Gede Raka Tantra juga memaparkan kondisi sulit yang sedang melanda pelaku perdagangan berjangka di tanah air. Salah satunya, disebabkan peluncuran kebijakan tentang pajak transaksi derivatif. Menurut Gede, penetapan pajak sebesar 2,5 persen itu sangat memberatkan. Contohnya, kata dia, jika ada transaksi Rp 100 juta maka transaksi itu dikenakan pajak sebesar Rp 2,5 juta. Suatu nilai yang baginya sangat mahal. Padahal sebelumnya, kebijakan pajak di bidang perdagangan berjangka diberlakukan setelah terjadi profit dari setiap transaksi.

“Kebijakan ini akan membuat pelaku pasar kesulitan keuangan. Kita dari APBI tentu akan membahas ini dengan sejumlah pihak terkait. Agar dapat memberi solusi terbaik bagi industri perdagangan berjangka,” ucap Gede.

Hal yang sama juga diungkapkan Dirut PT Kliring Berjangka Indonesia (KBI) Surdiyanto. Menurutnya, dasar pengenaan pajak transaksi derivatif untuk perdagangan berjangka itu tidak tepat sasaran dan terburu-buru. Ketentuan pajak sebesar 2,5 persen tersebut dipastikannya sangat memberatkan pelaku bisnis perdagangan berjangka. Namun menurutnya, segala sesuatu masih dapat diperjuangkan melalui musyawarah. Diharapkan, ada pengkajian ulang terhadap penetapan peraturan pajak tersebut. ▲

Aturan Main Pasar Lelang Forward

Ketentuan penyelenggaraan pasar lelang komoditi agro yang berlaku secara nasional saat ini, diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 650/MPP/Kep/10/2004, tentang, Ketentuan Penyelenggaraan Pasar Lelang Dengan Penyerahan Kemudian (forward) Komoditi Agro. Perumusan ketentuan ini berangkat dari pengalaman penyelenggaraan pasar lelang lokal spot di berbagai daerah dan acuan dari praktek-praktek pasar lelang yang dilakukan sejumlah negara.



Meskipun pasar lelang diselenggarakan secara periodik dalam jangka waktu tertentu, pasar lelang harus memenuhi persyaratan tertentu supaya kepentingan para pelaku terjamin keamanannya. Pasar lelang hanya dapat diselenggarakan oleh badan usaha atau dinas propinsi, kabupaten-kota yang membidangi perdagangan. Hal ini pun, setelah memperoleh persetujuan dari badan pengawas-Bappebti.

Dalam penyelenggaraan pasar lelang, penyelenggara diwajibkan memiliki susunan organisasi yang meliputi Ketua Lelang, Bidang Penyelenggaraan Transaksi, Bidang Pengawasan dan Penyelesaian Transaksi, Bidang Administrasi dan Keanggotaan. Susunan

penyelenggara tersebut dapat diperluas dengan pembentukan bidang-bidang lain sesuai kebutuhan transaksi komoditi. Sistem lelang dengan penyerahan kemudian- forward contract yang diselenggarakan secara teratur, wajar, efisien, transparan dan berkeadilan, merupakan faktor penting bagi keberhasilan pasar lelang dalam menjalankan misinya.

Pihak penyelenggara pun perlu mempersiapkan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pasar lelang, menetapkan tempat dan tanggal pelaksanaan, menentukan spesifikasi komoditi, dan mengatur sesi lelang, mengevaluasi dan menguji kualifikasi calon serta menerima atau menolak calon tersebut menjadi anggota pasar lelang. Penyelenggara pun harus

memantau harga yang terjadi di pasar spot bersama dengan lembaga kliring penjaminan (LKP). Serta, menetapkan besarnya uang simpanan anggota dan biaya layanan penyelenggaraan lelang, melakukan pengawasan penyelesaian kontrak jual beli anggota yang terjadi di pasar lelang secara berkala dan sewaktu-waktu diperlukan. Selain itu, penyelenggara melakukan tindakan yang dianggap perlu untuk mengamankan transaksi pasar lelang, termasuk mencegah kemungkinan terjadinya manipulasi harga, kualitas komoditi, dan menetapkan mekanisme penyelesaian pengaduan dan perselisihan sehubungan dengan transaksi pasar lelang. Penyelenggara pasar lelang pun berkewajiban mengambil langkah-langkah untuk menjamin terlaksananya mekanisme

ward



transaksi pasar lelang. Mengirimkan rekaman data transaksi harian dan data penyelesaian transaksi, serta order jual beli yang belum matching kepada LKP dan badan pengawas. Untuk mendukung terlaksananya tujuan pendirian pasar lelang, penyelenggara pasar lelang harus bekerja sama dengan lembaga kliring penjaminan dalam melakukan penyelesaian transaksi.

Peran dan Tugas Lembaga

Di dalam beroperasinya LKP hanya dapat dilakukan oleh badan usaha berbentuk perseroan terbatas yang telah memperoleh persetujuan dari badan pengawas- Bappebti. LKP pun mempunyai struktur organisasi minimal terdiri dari bidang kliring dan penyelesaian, pengendalian risiko, teknologi informasi, akuntansi dan keuangan, serta audit dan

kepatuhan.

LKP memiliki tugas dan berwenang untuk memastikan bahwa kegiatan operasional kliring sehari-hari dilaksanakan sesuai dengan peraturan, yakni, menetapkan persyaratan, menerima atau menolak calon anggota penjaminan; menetapkan persyaratan bagi anggota penjaminan, menetapkan dana jaminan dan biaya layanan kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi; meminta dan mendapatkan informasi yang diperlukan dari penyelenggaraan pasar lelang yang berhubungan dengan transaksi yang dilakukan oleh anggota penjaminan. Serta, mengambil langkah-langkah untuk menjamin terlaksananya mekanisme kliring dan penjaminan transaksi pasar lelang dengan baik. LKP juga harus mengambil tindakan tertentu yang dianggap perlu bila apAnggota penjaminan gagal memelihara persyaratan keuangan yang telah ditetapkan atau tidak memenuhi kewajiban yang jatuh tempo kepada LKP. Mengambil tindakan yang menurut pertimbangannya layak atau perlu untuk menegakkan ketaatan terhadap peraturan dan tata tertib LKP. Melakukan audit atau meminta pihak lain untuk melakukan audit, memeriksa catatan-catatan Anggota Penjaminan sewaktu-waktu dan melakukan dengar pendapat dengan anggota penjaminan sehubungan dengan kepatuhan anggota kliring terhadap peraturan dan tata tertib LKP.

Untuk mendukung terlaksananya fungsi pasar lelang, pihak penyelenggara dapat membentuk komite komoditi, komite lelang dan keanggotaan, komite arbitrase, serta kmita lainnya yang dianggap perlu.

Komite kmoditi bertugas membantu penyelenggara pasar lelang dalam merumuskan spesifikasi standar setiap komoditi yang meliputi jenis, asal, ukuran,

kualitas, pengemasan, batas waktu maksimum, tempat penyerahan dan kriteria lain yang dibutuhkan pasar lelang. Anggota komite komoditi terdiri dari praktisi yang mewakili para pelaku yang memahami bisnis komoditi yang bersangkutan. Komite lelang dan keanggotaan bertugas untuk membantu penyelenggara pasar lelang di bidang pelaksanaan lelang, keanggotaan serta membantu menyelesaikan perselisihan yang timbul dalam kegiatan perdagangan tersebut.

Anggota komite lelang dan keanggotaan terdiri dari wakil pelaku usaha yang memahami sistem, mekanisme operasional, peraturan tata tertib dan keanggotaan pasar lelang, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Komite arbitrase bertugas membantu penyelenggara pasar lelang untuk memfasilitasi penyelesaian perselisihan yang timbul antara anggota pasar lelang yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maupun mediasi-konsiliasi.

Komite keanggotaan membahas setiap permohonan dan kemudian menetapkan hari dan tanggal wawancara dengan calon anggota. Persetujuan atau penolakan menjadi anggota pasar lelang disampaikan kepada pemohon oleh penyelenggara pasar lelang melalui surat pemberitahuan. Bagi pemohon yang telah memenuhi persyaratan, diberikan persetujuan sebagai anggota pasar lelang. Penyelenggara pasar lelang memberikan persetujuan menjadi anggota pasar lelang kepada pemohon yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan tata tertib. Kepada pemohon juga diberikan sertifikat tanda keanggotaan setelah pemohon menandatangani pernyataan untuk tunduk pada ketentuan yang berlaku.

Keanggotaan pasar lelang berlaku secara nasional dan berlaku selama

yang bersangkutan aktif dalam kegiatan pasar lelang. Apabila tanda keanggotaan tersebut hilang atau rusak, penyelenggara pasar lelang dapat memberikan penggantian.

Lembaga penjaminan berfungsi untuk mengarahkan penyelenggara pasar lelang forward untuk mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu apabila diyakini dapat menimbulkan keadaan yang mengakibatkan pelaksanaan pasar lelang tidak berjalan dengan tertib dan teratur. Di samping itu, melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan penyelenggara pasar lelang forward, lembaga penjaminan dan pelaku pasar, menyetujui prosedur operasional standar yang ditetapkan oleh penyelenggara pasar lelang forward dan LPK. Dan juga, melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian masyarakat akibat pelanggaran terhadap peraturan berlaku.

Badan pengawas, berwenang

mengenaikan sanksi administratif atas pelanggaran terhadap peraturan ini. Sanksi administratif dapat berupa peringatan tertulis, denda administratif, pembekuan persetujuan; atau pencabutan persetujuan.

Lembaga perbankan berperan dalam penyelesaian transaksi pasar lelang melalui skema transfer dana atau fasilitas SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri). Uang muka dan uang jaminan transaksi disimpan di bank yang bekerjasama dengan LKP dalam rekening terpisah atas nama masing-masing pelaku.

Di dalam perkembangannya dengan adanya kepastian penyelesaian kontrak jual beli forward yang dijamin oleh LKP, pihak bank dapat memberikan dukungan pembiayaan kepada pelaku pasar.

Lembaga sertifikasi mutu komoditi, berperan memastikan kualitas komoditas, untuk itu diperlukan peran lembaga

independen yang dapat menerbitkan sertifikat mutu komoditas yang bersangkutan.

Lembaga pergudangan diperlukan untuk menyimpan dan memelihara jumlah maupun kualitas komoditas yang disimpan.

Lembaga asuransi memberikan perlindungan terhadap resiko kehilangan, kebakaran dan sebagainya.

Keanggotaan pasar lelang terdiri dari pedagang, kelompok tani- usaha pertanian, koperasi, petani produsen, pabrikan, industri, swalayan dan eksportir; serta perantara perdagangan. persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi anggota pasar lelang adalah perorangan warga negara Indonesia. Bila berbentuk perusahaan memiliki badan hukum berbentuk perseroan komanditer atau firma, serta bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia. Mempunyai reputasi dan integritas yang baik dalam usaha. Menyetorkan jaminan keanggotaan yang besarnya dan tata cara penyetorannya ditetapkan penyelenggara pasar lelang dalam peraturan tersendiri. Di samping persyaratan yang tersebut, pemohon baik badan usaha ataupun perorangan harus memiliki tenaga ahli di bidang perdagangan komoditi agro.

Tata cara untuk menjadi anggota pasar lelang adalah dengan mengajukan surat permohonan kepada penyelenggara pasar lelang. Pemohon yang berasal dari petani produsen (penjual) wajib melampirkan surat rekomendasi dari dinas pertanian. Untuk pedagang, pabrikan, eksportir (pembeli) melampirkan surat rekomendasi dari dinas terkait setempat. ▲

bersambung.....



Harga Gula Semakin Melemah



Harga gula di pasaran dunia memang sedang jungkir balik di level terendah Sementara gula lokal meski harganya tidak melorot, tetapi sempat menunjukkan penurunan karena daerah Sumatra sedang memasuki masa musim giling. Tetapi di pasar internasional, pengaruh krisis global menurunkan minat untuk belanja komoditas termasuk gula. Belum lagi terdengar kabar upaya Brazil untuk meningkatkan produksinya demi pembuatan ethanol. Akibatnya, harga gula dunia seakan kian terperosok saja.

Bahan bakar alternatif ini memang berbahan dasar produk pangan, salah satunya gula.

Sementara dari tanah air dilaporkan, harga gula lokal mulai menunjukkan tanda-tanda penurunan. Masa musim giling di wilayah Sumatra telah membuat pedagang mulai "merelakan" stok gula untuk dilepas di pasaran demi menantikan kedatangan gula baru. Kegiatan yang dilakukan pedagang ini juga demi mengantisipasi kerugian. Sebab para pembeli tentunya akan lebih memilih gula baru dibandingkan stok gula lama. Sejumlah pihak memprediksi, penurunan harga ini akan berkelanjutan mengingat masa musim giling sudah tiba. PT Perkebunan Nusantara di Sumatra telah memulai masa musim giling. Selanjutnya di bulan Mei, wilayah Jawa baru akan menggelar kegiatan tersebut.

Pemerintah juga berencana menaikkan harga dasar pembelian gula kristal putih (GKP) pada Mei nanti menjadi Rp 5.350 per kg atau meningkat sebesar Rp 350 per kg. Keputusan penghapusan impor GKP juga ditetapkan untuk tahun ini, meski tetap ada instrument untuk memproteksi harga gula ditengah kegiatan musim giling tebu. Menurut Deputy Bidang Pertanian dan Kelautan Menko Bidang Perekonomian, Bayu Krisnamurthi, harga patokan minimum gula

bertujuan mengamankan harga gula saat musim giling demi mengamankan pendapatan petani. Serta juga menjaga harga tidak terlempar jauh dari harga dasar pembelian gula tersebut. Mengenai harga dasar pembelian untuk musim giling tebu, juga telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Perdagangan No. 560/M-DAG/PER/4/2009 tentang Impor Gula. Sebelumnya, mekanisme pengamanan harga gula pada tahun lalu dilakukan pihak importir gula kristal putih.

Dalam peraturan ini, perusahaan yang ditunjuk sebagai importir terdaftar (IT) gula wajib melakukan penyanggahan harga gula jika harga di tingkat petani di bawah Rp 5 ribu per kg, bekerja sama dengan pihak lain yang memperoleh persetujuan dari Asosiasi Petani Tebu. Pemerintah juga menunjuk perusahaan lain untuk melaksanakan impor dalam rangka penyanggahan harga gula kristal putih dan penyediaan gula nasional. Dalam perhitungannya, persentase gula petani sebesar 66 persen, sementara gula PTPN sebesar 34 persen. Pihak pedagang dan produsen gula juga telah berkomitmen untuk menjaga harga di tingkat konsumen tetap berkisar antara Rp 7 ribu hingga Rp 7.500 per kg. Bayu juga memperkirakan, harga jual gula pada masa panen masih berkisar antara Rp 5.700 hingga Rp 5.800 per kg. ▲

Harga gula mendulang duka karena terpengaruh dari anjloknya harga minyak dan merosotnya saham. Bursa ICE Futures di New York mencatat, harga kontrak gula untuk pengiriman Mei turun sebesar 0,13 sen menjadi 12,62 sen per pound. Yang menyedihkan, bahkan harga gula sempat lebih terjungkal lagi di level 12,51 sen. Setelah sejak awal tahun sempat menorehkan kenaikan sebesar 6,9 persen, pada pekan terakhir Maret lalu harga gula malah melorot sebesar 6,8 persen.

Kondisi harga gula yang kian parah memang juga terpengaruh dari rencana penambahan volume produksi dari Brazil. Pada periode pemasaran yang diawali April, Brazil menargetkan peningkatan produksi sebesar 4,1 juta ton atau meroket menjadi 34,2 juta ton. Wajar saja, karena sebagai negara produsen gula terbesar di dunia Brazil akan menggunakan komoditas ini sebagai bahan pembuat ethanol.

■ ■ ■ Bappebti Boyongan ke Kramat Raya

Bappebti saat ini menempati kantor baru di Jl. Kramat Raya No. 172, Jakarta Pusat. Di gedung baru itu, Bappebti menempati lantai tiga, empat dan lima. Secara resmi operasional Bappebti di gedung baru itu diterhitungkan sejak 1 April 2009, sedangkan boyong-boyongan alat dan pekerjaan para staf sudah dilakukan dipenghujung akhir bulan Maret 2009.

Gedung yang ditempati Bappebti itu semula digunakan Badan Pengembangan Ekspor Nasional (BPEN), dan kini pun BPEN telah merapat di kantor pusat Departemen Perdagangan.

Selama ini, Bappebti menempati kantor di lantai empat Gedung Bumi Daya Plasa, Jl. Imam Bonjol Kav. 61, Jakarta Pusat. Di gedung inilah hampir sembilan tahun lamanya

Bappebti menjalankan tugas dan fungsinya, selaku otoritas pengawas dan pembina Bursa Berjangka Jakarta yang beroperasi perdana pada tahun 2000.

Sejumlah harapan dan doa di sampaikan Kepala Bappebti, Deddy Saleh, pada acara syukuran dan selamat kantor baru, itu, yang diselenggarakan 6 April 2009. Menurut Deddy, dengan kantor barunya itu yang representative diharapkan kinerja Bappebti semakin meningkat. Serta, manfaatnya secara ekonomis dapat dirasakan masyarakat. ▲

Comprehensive Economic Partnership Agreement

Pengembangan Perdagangan Berjangka Indonesia - India

Bappebti mengusulkan pengembangan perdagangan berjangka komoditi masuk dalam Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (*Comprehensive Economic Partnership Agreement/CEPA*) yang tengah dibahas antara pemerintah Indonesia dan India. Upaya ini antara lain sebagai tindak lanjut dari kerjasama yang telah dilakukan Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) dengan Multi Commodity Exchange of India Ltd., (MCXI). Nota kesepahaman kerjasama bursa berjangka dari dua negara ini telah ditandatangani pada awal tahun 2008.

Kepala Bappebti, Deddy Saleh, mengatakan, Indonesia dapat mempelajari pengembangan perdagangan berjangka dari India yang dinilai lebih maju dalam penyelenggaraan transaksi berjangka dan perdagangan fisik komoditi. "Fokus pengembangan perdagangan berjangka komoditas diantaranya strategi membangun pasar fisik yang kuat sebagai penunjang dan prasyarat bagi penyelenggaraan perdagangan berjangka komoditas yang baik dan likuid," katanya.

Sementara itu, Dirut BBJ, Hasan Zein Mahmud, mengatakan, BBJ menyambut baik CEPA yang memuat usulan kerja sama dalam fasilitasi perdagangan kontrak



berjangka komoditi. Kerja sama yang dilakukan itu tujuannya hanya satu, yaitu menguntungkan bagi BBJ dan Indonesia secara luas. BBJ telah merintis kerja sama dengan India sejak awal 2008 yang diwujudkan dalam MoU dengan Multi Commodity Exchange of India Ltd., (MCXI). Kerja sama serupa juga telah dilakukan dengan bursa Malaysia, pada tahun 2007.

"Bahkan, BBJ berminat berperan aktif dalam pembahasan kerja sama melalui kerangka CEPA. Oleh karena itu, BBJ membuka sejumlah potensi kerja sama dengan lembaga lain termasuk dari luar negeri yang berminat mengembangkan perdagangan komoditi," jelas Hasan. ▲

Declarasi Gunakan BAKTI

Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Deddy Saleh dan pihak Departemen Perdagangan menyaksikan penandatanganan deklarasi penggunaan Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) oleh PT. Bursa Berjangka Jakarta, PT. Kliring Berjangka Indonesia, Asosiasi Pialang Berjangka Indonesia, dan Ikatan Perusahaan Pedagang Berjangka Indonesia untuk menyelesaikan Perselisihan Perdata di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, pada 21 April 2009.

Deklarasi ini dilakukan sebagai bentuk komitmen para pelaku yang terlibat dalam Perdagangan Berjangka di Indonesia untuk menyelesaikan perselisihan perdata secara cepat, biaya yang relatif ringan, transparan,

independen dan efisien di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi. Apalagi diketahui saat ini, terdapat kebutuhan yang sangat tinggi akan sarana alternatif penyelesaian perselisihan perdata di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi yang cepat dan adil. Mengingat sengketa yang terjadi sering tidak terselesaikan dengan baik dan cepat di pengadilan umum, karena sifat dari Perdagangan Berjangka yang sangat khusus. Demi mengakomodir kebutuhan tersebut, atas inisiasi Bappebti didirikanlah BAKTI oleh PT. Bursa Berjangka Jakarta, PT. Kliring Berjangka Indonesia, Asosiasi Pialang Berjangka Indonesia, dan Ikatan Perusahaan Pedagang Berjangka Indonesia pada tanggal 7 November 2008 lalu sebagai lembaga mandiri dan independen untuk menyelesaikan

perselisihan sengketa perdata di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Diharapkan kedepannya, keberadaan BAKTI dalam industri Perdagangan Berjangka akan menghasilkan keputusan yang berkekuatan hukum tetap dalam rangka melindungi masyarakat dari pihak-pihak yang melakukan praktik perdagangan yang merugikan, serta menjadi badan yang kompeten untuk menyelesaikan sengketa perdata diantara para pelaku Perdagangan Berjangka apabila upaya mediasi secara musyawarah gagal dilakukan.

Melalui komitmen ini, juga diharapkan akan lebih menumbuhkan keyakinan dunia usaha dan investor untuk memanfaatkan Perdagangan Berjangka Komoditi sebagai sarana lindung nilai (hedging) dan investasi. ▲

Dalam upaya sosialisasi dan uji coba sistem perdagangan baru yang dimiliki Bursa Berjangka Jakarta (BBJ), digelar simulasi transaksi multilateral kontrak berjangka. Transaksi simulasi yang dilakukan secara on-line selama dua bulan itu menawarkan lima produk kontrak berjangka komoditi.

Dirut BBJ, Hasan Zein Mahmud, mengutarakan, sosialisasi dan edukasi masyarakat itu untuk meningkatkan minat masyarakat berinvestasi dan likuiditas transaksi kontrak berjangka. Di samping itu, memberi pemahaman tentang tentang lindung nilai dan mekanisme pembentukan harga sebagai fungsi utama perdagangan berjangka.

"Oleh karena itu, BBJ dan PT Kliring Berjangka Indonesia (KBI), kembali menyelenggarakan simulasi terpadu Transaksi Multilateral Kontrak Berjangka secara on-line. Produk kontrak berjangka yang ditransaksikan secara multilateral, adalah produk yang berbasis komoditi. Diantaranya, kontrak berjangka olein (OLE), emas (GOL), kontrak gulir indeks

BBJ Gelar Simulasi Berhadiah

emas (KIE), kontrak gulir emas dalam rupiah (KGE) dan kontrak gulir emas dalam US\$ (KGEUSD).

"Simulasi transaksi multilateral kontrak berjangka ini akan diselenggarakan selama dua bulan, mulai Kamis, 16 April-16 Juni 2009. Dengan sistem on-line, para peserta dimana pun dapat mengikuti simulasi melalui jaringan internet," kata Hasan. Simulasi kali ini menggunakan sistem elektronik yang baru, yang memungkinkan beberapa kontrak ditransaksikan secara simultan. Dengan demikian, setiap peserta memiliki peluang untuk memanfaatkan ketrampilannya membaca trend dari berbagai produk dalam portfolio yang lebih komprehensif.

Bagi para peserta yang mengikuti simulasi dalam uji coba sistem baru



BBJ itu, disediakan hadiah dengan total nilai Rp 90 juta. Hadiah berjangka bagi pemenang pertama, kedua dan ketiga disiapkan sponsor PT Harumdana Berjangka Rp 50 juta, dari PT Milenium Penata Futures Rp 25 juta dan ketiga dari PT Monex Investindo Berjangka senilai Rp 15 juta.

Selain itu, penyelenggara juga menyediakan piagam penghargaan kepada perusahaan pialang dengan tiga kategori yaitu pialang dengan jumlah total nasabah aktif terbanyak, pialang dengan total volume terbanyak, dan pialang dengan total profit nasabah terbesar. ▲

Mengenjot Sektor Agro

SRG mampu meningkatkan efisiensi sektor agro industri, karena mampu merubah status persediaan bahan mentah atau setengah jadi, menjadi suatu produk yang dapat diperjual belikan secara luas. Serta, dapat digunakan sebagai agunan untuk memperoleh kredit dari bank, dan dapat diterima sebagai alat pembayaran dalam perdagangan derivatif seperti penyerahan barang di bursa berjangka.

Indonesia yang dikenal sebagai negara agraris, nan subur dan memiliki keunggulan serta keragaman komoditi, berperan strategis dalam perekonomian nasional. Di sisi lain, nyaris sebagian besar masyarakat berprofesi dan terkait di sector pertanian.

Pada kondisi itu, dalam menghadapi liberalisasi perdagangan serta globalisasi pasar, pemerintah mengurangi intervensi di bidang subsidi, tata niaga serta pengaturan harga. Oleh karenanya, tidak ada lagi perlindungan terhadap petani produsen untuk memperoleh harga minimum. Bahkan, bentuk proteksi lain dari masuknya barang impor nyaris minim.

Di pihak lain, bank sebagai institusi penyaluran kredit untuk usaha sector pertanian, mengalami kesulitan menarik kembali kredit yang disalurkan. Karena, tidak adanya jaminan dari pemerintah. Hal inilah berdampak kecilnya nilai kredit yang diserap sector pertanian dibandingkan dengan sector lain.

Menjawab permasalahan itu, pemerintah mengembangkan Sistem Resi Gudang (SRG). Karena, instrumen ini memiliki peran strategis dalam mendukung upaya pemerintah meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Keterpurukan ekonomi Indonesia, di masa lalu, lebih disebabkan tidak adanya kemampuan para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Seperti, lemahnya daya saing dan rendahnya kualitas sumber daya manusia.

Melalui SRG, akan tersedia alternatif pendanaan bagi pelaku usaha yang digunakan

sebagai modal kerja. Yang pada gilirannya akan meningkatkan kemampuan usaha.

Melihat pengalaman di beberapa Negara, yang menyelenggarakan SRG, maka pengembangannya di Indonesia perlu memperhatikan sistem yang berlaku di negara tersebut.

Seperti diketahui, dalam perdagangan komoditi merupakan bidang yang memerlukan intensitas kredit yang tinggi. Dan, di negara-negara berkembang, hal ini justru merupakan permasalahan. Kenyataan menunjukkan, bahwa para pengusaha termasuk produsen kecil dan petani umumnya banyak menghadapi masalah karena mereka tidak memiliki akses kredit. Atau, kalau pun ada, biayanya tinggi. Sedangkan para petani besar dan sector perkebunan, mampu menggunakan sector keuangan untuk memperoleh pinjaman dengan tingkat bunga rendah.

Hal tersebut sangat berpengaruh dalam mengembangkan sector pertanian dan dapat mengurangi daya saing sector tersebut. Dengan adanya akses kredit dengan biaya murah, dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas produk yang dihasilkan para petani.

Hambatan Petani

Untuk memperoleh fasilitas kredit, baik dari sector formal maupun sector informal, petani menghadapi berbagai hambatan. Seperti, tidak dimilikinya agunan dalam bentuk fixed asset, seperti tanah dan bangunan. Birokrasi dan administrasi yang berbelit-belit, kurangnya pengalaman bank dalam

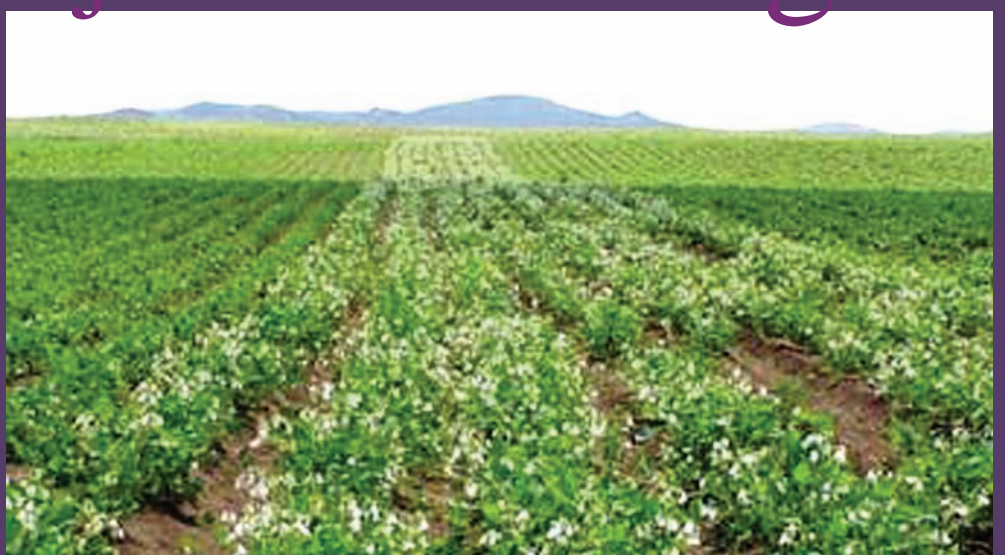
melayani wilayah pedesaan. Tingginya biaya pinjaman dari sector informal, tingginya tingkat risiko yang berhubungan dengan pengusaha atau produsen kecil. Ketergantungan sector formal yaitu tidak cukupnya dana yang tersedia, tingginya tingkat bunga, keterbatasan jangkauan sector informal. Serta, lemahnya pengawasan, tidak adanya kerjasama dengan sector formal dan kurangnya dukungan pemerintah.

Selain karena posisinya yang lemah, petani juga dihadapkan kepada beberapa masalah lain. Yaitu, tidak mudah akses pada informasi harga, yang menyebabkan petani selalu dirugikan dalam transaksinya dengan para pembeli. Serta, adanya intervensi pemerintah dalam stabilitas harga produk pertanian dapat menimbulkan disinsentif bagi pengembangan kualitas produksi.

Solusi

Pada dasarnya, SRG dapat memberikan solusi untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi petani tersebut. Karena Resi Gudang suatu tanda bukti penyimpangan komoditi yang dapat digunakan sebagai agunan kepada bank karena tanda bukti tersebut dijamin dengan adanya persediaan komoditi tertentu dalam suatu gudang yang dikelola perusahaan pergudangan (warehouse manager) secara profesional. Sistem ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem pemasaran dan keuangan yang telah dikembangkan di Negara-negara maju.

Sistem ini telah mampu meningkatkan efisiensi sektor agro industri, karena baik



Melalui Instrumen SRG

produsen maupun sector komersial telah mampu merubah status persediaan bahan mentah dan setengah jadi menjadi suatu produk yang dapat diperjual belikan secara luas. Hal ini dimungkinkan karena Resi Gudang merupakan instrument keuangan yang dapat diperjual belikan, dipertukarkan (swapped), digunakan sebagai agunan untuk memperoleh kredit dari bank, dan dapat diterima sebagai alat pembayaran dalam perdagangan derivatif seperti penyerahan barang di bursa berjangka.

Tujuan dikembangkannya SRG adalah untuk menyediakan alternatif pendanaan bagi pelaku usaha sehingga dapat meningkatkan kemampuan usahanya. Bank bisa memberikan kredit kepada pelaku usaha dengan inventory (komoditas) sebagai agunan.

Manfaat ekonomis lainnya penggunaan Resi Gudang oleh pelaku usaha, yaitu memperpanjang masa penjualan hasil produksi petani. Petani yang menyerahkan hasil panennya ke perusahaan pergudangan, akan menerima tanda bukti berupa Resi Gudang. Tanda bukti ini dapat dijadikan agunan untuk memperoleh pinjaman jangka pendek di bank.

Dengan demikian, para petani tidak perlu tergesa-gesa menjual hasilnya pada masa panen yang umumnya ditandai dengan turunnya harga komoditas. Hal ini dilakukan petani, yang berkeyakinan bahwa harga setelah panen akan naik, sehingga dengan menunda penjualan justru akan memberikan hasil yang optimal bagi petani.

Sementara itu, pemegang Resi Gudang dapat memperoleh sumber kredit dari bank untuk digunakan sebagai modal kerja. Seperti pembelian bibit, pupuk dan keperluan lainnya. Sedangkan tingkat bunga pinjaman selalu dikaitkan dengan tingkat resiko dari agunan yang diberikan.

Untuk itu, jaminan dari Resi Gudang atas jumlah, kualitas, dan ketepatan waktu penyerahan barang akan dapat mengurangi tingkat resiko yang dihadapi komoditi, dengan demikian tingkat bunga pinjaman dengan agunan Resi Gudang dapat lebih rendah.

Sebagai agunan bank, karena memberikan jaminan adanya persediaan komoditi dengan kualitas tertentu kepada pemegangnya tanpa harus melakukan pengujian secara fisik. Resi Gudang dapat dimanfaatkan

kan petani untuk pembiayaan produknya, sedangkan bagi produsen untuk membiayai persediaan.

Bila terjadi penyimpangan dalam sistem ini, para pemegang Resi Gudang dijamin akan memperoleh prioritas dalam penggantian sesuai dengan nilai agunannya. Terkumpulnya persediaan komoditi dalam jumlah besar akan mempermudah memperoleh kredit dan menurunkan biaya untuk memobilisasi sector agrobisnis.

Kompetitif

Resi Gudang memberikan informasi yang diperlukan penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi, yang merupakan dasar untuk melakukan perdagangan komoditi secara luas. Keberadaan Resi Gudang dapat meningkatkan volume perdagangan sehingga dapat menurunkan biaya transaksi. Hal itu dimungkinkan karena dalam bertransaksi tidak perlu lagi dilakukan inspeksi terhadap barang yang disimpan, baik yang ada di gudang maupun di tempat transaksi. Di beberapa Negara, yang telah menerapkan sistem ini, transaksi umumnya hampir tidak pernah lagi dilakukan di gudang.

Bila transaksi dilakukan untuk penyerahan barang dikemudian hari (perdagangan berjangka), Resi Gudang dapat dijadikan sebagai instrument untuk memenuhi penyerahan komoditas bagi kontrak berjangka di bursa komoditi yang jatuh tempo.

Dengan tersedianya instrument SRG, akan mengurangi peran pemerintah dalam stabilisasi harga di bidang komoditi. Bila harga komoditi strategis berada di bawah harga dasar, maka pemerintah dapat membeli Resi Gudang, sehingga tidak perlu lagi menerima penyerahan barang secara fisik. Karena adanya jaminan kualitas dan kuantitas komoditi di gudang-gudang penyimpanan, maka Pemerintah dalam rangka pengelolaan cadangan strategis cukup memegang Resi Gudang saja.

Bila swasta yang melakukan pembelian, penyimpanan dan penjualan komoditi melalui mekanisme Resi Gudang dalam jumlah yang besar. Serta, sekaligus melakukan lindung nilai di pasar berjangka, maka peran pemerintah dalam stabilisasi harga dapat dihapuskan.

Di samping itu, instrument ini memberi kepastian nilai minimum dari komoditi yang dijadikan agunan. Karena sifat komoditi primer yang cepat rusak dan standar kualitasnya berbeda-beda maka tanpa adanya Resi Gudang dan lindung nilai, bank-bank umumnya akan memberikan kredit sebesar 50 – 60 persen dari nilai agunan. Dengan demikian, bank dapat memberikan kredit yang lebih besar kepada peminjam yang melakukan lindung nilai (hedging) untuk komoditi yang dijaminkannya (sampai dengan 80-90% dari nilai agunan). ▲

Manfaat SRG bagi pelaku usaha

- Fleksibilitas waktu penjualan
- Memungkinkan akan diperolehnya harga jual yang lebih baik
- Peningkatan akses ke bank
- Bunga pinjaman bisa lebih rendah
- Insentif bagi peningkatan produksi baik mutu dan volume.

Manfaat SRG bagi perbankan

- Resiko pinjaman lebih kecil
- Perhitungan agunan lebih mudah dan cepat
- Memperluas jumlah fasilitas kredit.

Sektor Ikutan SRG

- Sektor keuangan, karena memberikan suatu agunan yang likuid kepada kreditor.
- Industri sortasi dan inpeksi, karena diperlukannya pengawasan standar mutu bagi komoditi yang diagunkan agar dapat diterima oleh semua pihak yang melakukan transaksi.
- Sektor perdagangan, karena dapat digunakan sebagai dokumen bukti penyerahan barang sehingga meningkatkan efisiensi transaksi.
- Bursa berjangka komoditi, karena dapat meningkatkan likuiditas Bursa dengan meningkatnya Resi Gudang yang dilindung nilai (dihedge) sehingga kredit yang diberikan kreditor menjadi lebih terjamin.

► **Agenda FOTO** ◀



Pelatihan Teknis Pelaku Usaha Perdagangan Berjangka Komoditi di Medan, Sumatera Utara, 11-12 Maret 2009. Kepala Bappebti, Deddy Saleh, membuka acara tersebut dan memberi pengarahan bagi pelaku usaha perdagangan berjangka Sumut. Peserta pelatihan diikuti sebanyak 65 peserta. Dalam pelatihan itu, menitikberatkan pedoman perilaku pialang berjangka serta permodalan. Diujung acara pelatihan, Kepala Biro Perniagaan Bappebti, Made Sukarwo dan Kepala Biro Hukum Bappebti, Pater Y Angwarmasse, memberikan sertifikat pelatihan teknis secara simbolis kepada peserta. ▲



► Agenda FOTO ◀



Terhitung sejak 1 April 2009, Bappebti menempati gedung baru di jalan Kramat Raya No. 172 Jakarta Pusat. Moment bersejarah bagi perjalanan Bappebti itu, dirayakan dengan syukuran bersama keluarga besar Bappebti, pada 6 April 2009. Kepala Bappebti, Deddy Saleh, memberikan sambutan serta harapannya bagi lembaga yang dipimpinnya itu. ▲



Jahe

Bekal Awak NASA

*Selama ini kita mengenal jahe (*Zingiber officinale*), sebagai salah satu pelengkap bumbu untuk urusan dapur.*

Meski banyak juga yang memahami khasiat jahe sebagai tanaman yang rasanya hangat dan cenderung pedas untuk pengobatan tradisional.

Dari mengatasi urusan perut, stroke hingga mabuk perjalanan. Bahkan, pihak NASA pernah tertarik meneliti jahe sebagai upaya mengatasi masalah mabuk para awak NASA dalam perjalanan ke luar angkasa.

Sepak terjang jahe sebagai tanaman yang banyak diminati sebenarnya sudah dikenal sejak zaman dahulu kala. Tetapi mengenai asal tanaman ini, sampai kini masih menjadi suatu perdebatan. Dimana beberapa pihak meyakini jika jahe merupakan tanaman asli dari India. Sementara tidak sedikit pihak justru percaya jika Republik Rakyat Cina Selatan merupakan negara asal tanaman ini. Tetapi jika ditelusuri proses perkembangannya, dari India, jahe rupanya dibawa sebagai rempah perdagangan hingga Asia Tenggara, Tiongkok, Jepang, hingga Timur Tengah.

Kemudian pada zaman kolonialisme di wilayah Asia, jahe yang bisa memberikan rasa hangat dan pedas pada makanan ini kemudian cepat terdongkrak popularitasnya di benua Eropa. Namun, karena jahe hanya bisa bertahan hidup di daerah tropis, penanamannya hanya dapat dilakukan di daerah katulistiwa seperti Asia Tenggara, Brasil, dan Afrika. Sementara produsen jahe terbesar di dunia masih dipengang Equador dan Brasil.

Jahe dapat tumbuh subur di ketinggian 0 hingga 1500 meter di atas permukaan laut, kecuali jenis jahe gajah di ketinggian 500 hingga 950 meter. Dibutuhkan curah hujan 2500 hingga 3000 mm per tahun, kelembapan 80 persen dan tanah lembab dengan PH 5,5 hingga 7,0 dan

unsur hara tinggi demi pengoptimalan produksi. Dan harus digarisbawahi, tanah yang digunakan untuk penanaman jahe tidak boleh tergenang.

Dalam wujudnya, jahe sendiri merupakan tanaman rimpang yang sangat populer sebagai rempah-rempah dan bahan obat. Rimpangnya berbentuk jemari yang menggembung di ruas-ruas tengah. Rasa dominan pedas disebabkan senyawa keton bernama zingeron. Jahe termasuk suku Zingiberaceae (temu-temuan). Nama ilmiah jahe diberikan oleh William Roxburgh dari bahasa Yunani- *zingiberi*, sedangkan dari bahasa Sanskerta dikenal *singaberi*.

Batang jahe adalah batang semu dengan tinggi 30 hingga 100 cm. Dengan akar berbentuk rimpang dengan daging akar berwarna kuning hingga kemerahan dengan bau menyengat. Daun menyirip dengan panjang 15 hingga 23 mm dan panjang 8 hingga 15 mm. Tangkai daun berbulu halus.

Sementara bunga jahe tumbuh dari dalam tanah berbentuk bulat telur dengan panjang 3,5 hingga 5 cm dan lebar 1,5 hingga 1,75 cm. Gagang bunga bersisik sebanyak 5 hingga 7 buah. Bunga berwarna hijau kekuningan. Bibir bunga dan kepala putik ungu. Tangkai putik berjumlah dua.

Sebagai produk yang diminati, jahe saat ini dapat dikonsumsi dalam berbagai

bentuk. Kondisi ini antara lain disebabkan karena rimpang jahe, terutama yang dipanen pada umur yang masih muda tidak mampu bertahan lama jika disimpan di gudang. Sehingga harus dilakukan pengolahan secepatnya agar tetap layak untuk dikonsumsi. Dari masalah ini kemudian muncul ide pemasaran jahe dari beragam bentuk serta kegunaan, diantaranya jahe segar, awetan jahe, jahe bubuk, minyak jahe dan oleoresin jahe.

Jahe kering merupakan potongan jahe yang kemudian dikeringkan. Jenis ini sangat populer di pasar tradisional. Awetan jahe merupakan hasil pengolahan tradisional dari jahe segar, terutama jahe muda. Yang paling sering ditemui di pasaran adalah acar, asinan, sirup, dan kristal jahe. Jenis ini disukai konsumen dari daerah Asia dan Australia. Lalu ada juga jahe dalam bentuk bubuk, yang merupakan hasil pengolahan lebih lanjut dari jahe menggunakan teknologi industri. Bubuk jahe diperlukan untuk keperluan farmasi, minuman, alkohol dan jamu. Biasanya menggunakan bahan baku jahe kering. Dan pada perkemban-

gannya, ada juga Oleoresin jahe yang merupakan hasil pengolahan lebih lanjut dari tepung jahe. Bentuknya berupa cairan cokelat dengan kandungan minyak asiri 15 hingga 35 persen.

Varietas jahe yang dikenal luas di pasaran diantaranya, jahe gajah, jahe kuning dan jahe merah. Jahe gajah merupakan jahe yang paling disukai di pasaran internasional. Bentuknya besar gemuk dan rasanya tidak terlalu pedas. Daging rimpang berwarna kuning hingga putih. Jahe kuning merupakan jahe yang banyak dipakai sebagai bumbu masakan, terutama untuk konsumsi lokal. Rasa dan aromanya cukup tajam. Ukuran rimpang sedang dengan warna kuning. Lalu jahe merah merupakan jenis jahe yang memiliki kandungan minyak asiri tinggi dan rasa paling pedas, sehingga cocok untuk bahan dasar farmasi dan jamu. Ukuran rimpangnya paling kecil dengan warna merah dengan serat lebih besar dibanding jahe biasa.

Selain menjadi bahan jamu, kita juga mengenal jahe sebagai bahan untuk pembuatan sekoteng, bandrek, dan wedang jahe

yang merupakan minuman yang digemari karena mampu memberikan rasa hangat di malam hari, terutama di daerah pegunungan. Sementara di masyarakat barat, *ginger ale* merupakan produk yang digemari. Dan di Jepang dan Tiongkok sangat menyukai asinan jahe. Demikian pula masyarakat Eropa senang dengan sirup jahe.

Cerita tentang ketertarikan pihak NASA untuk mengatasi mabuk perjalanan luar angkasa dengan jahe, jelas bukan anekdot semata. Dalam kenyataannya, memang jahe selama ini terbukti berkompeten dalam urusan mengatasi masalah tersebut. Terutama untuk urusan pengobatan tradisional dan pergerakan usaha kecil tanah air, jahe tentu tidak hanya sebagai bumbu pelengkap masakan saja. Tetapi juga rutin mengisi celah bakul para Mbakyu jamu gendong.

Dan apabila dikemudian hari jahe juga mampu mengatasi masalah mabuk perjalanan luar angkasa, bukan tidak mungkin jika sebelum terbang para awak NASA diwajibkan menggelar ritual minum jamu jahe terlebih dahulu. ▲



Resep Bikin Dada Montok

Sebenarnya, memang tidak ada yang tahu persis asal mulanya tanaman jahe ini telah dikenal sebagai bumbu dapur yang berkhasiat obat sejak ratusan tahun yang lalu. Di China, jahe kering telah dipakai sebagai bahan baku obat oleh seorang tabib yang hidup pada zaman kaisar Shen Nong, yang hidup 2000 tahun sebelum masehi. Dari daratan Tiongkok ini juga di temukan dua buku kedokteran yang pertama kali membahas khasiat jahe segar pada tahun 500 masehi. Selain di negeri China, India juga diketahui menjadi salah satu

negara penyebaran komoditas ini.

Negara-negara barat juga banyak yang memanfaatkan jahe sebagai obat tradisional. Setidaknya itu dibuktikan dengan bahasan khasiat tanaman jahe yang tertulis pada buku kedokteran anglo saxon yang terbit pada abad ke 11. Dan dua abad kemudian, jahe merupakan bumbu dapur yang sangat populer di Inggris, setelah lada hitam. Sankin diminatinya di Eropa saat itu, harga bumbu dapur ini meroket tajam. Bahkan, untuk memperoleh 1 pon (setengah kilogram) jahe, harus mengeluarkan uang yang

nilainya setara dengan seharga seekor domba!

Dalam kamus pengobatan China, ada sedikit perbedaan antara jahe segar dengan jahe kering. Ahli pengobatan sering memakai jahe segar untuk mengusir 'hawa dingin' atau 'racun' dan mengurangi rasa mual. Sementara jahe kering di pakai untuk menyembuhkan kekurangan 'hawa dingin' pada nyeri lambung, nyeri perut, diare, batuk dan rematik.

Untuk di wilayah India, jahe segar juga dimanfaatkan untuk mengobati mual, asma, batuk dan rasa nyeri yang hebat dan mendadak, juga dipakai untuk mengatasi jantung berdebar-debar, gangguan pencernaan, nafsu makan menurun dan rematik. Bahkan, pada abad ke 19, sari jahe menjadi obat asma dan batuk yang populer di India. Untuk obat batuk, sari jahe di campur jus bawang putih segar dan madu, sedangkan untuk meredakan mual, jahe segar ditambah sedikit madu dan sejumlah bulu burung merak bakar. Bubuk jahe segar juga bisa di campur air, kemudian di aduk hingga berbentuk pasta dan dioleskan di pelipis untuk meredakan sakit kepala.

Berbeda kondisi di benua Eropa, dimana kebanyakan orang Eropa minum



kan bahwa jahe menghambat oksidasi (bersifat antioksidan) sehingga dapat mengurangi resiko penyakit kanker, dan juga menghambat pertumbuhan dari kuman.

Jahe juga bermanfaat untuk sirkulasi darah. Tumbuhan rimpang ini memiliki khasiat antikoagulan (anti pembekuan darah) yang lebih hebat dari pada bawang putih atau bawang merah. Jahe juga mampu menurunkan kadar kolesterol karena bisa mengurangi penyerapan kolesterol dalam darah dan hati. Penelitian yang dilakukan oleh ahli-ahli di Jepang memperlihatkan bahwa jahe dapat menurunkan tekanan darah dengan jalan mengurangi laju aliran darah perifer (aliran darah tepi).

Pada umumnya penelitian jahe diutamakan untuk mengetahui efeknya terhadap pencernaan. Di negeri Cina, hasil penelitian yang dilakukan terhadap manusia menunjukkan bahwa minuman yang terbuat dari jahe segar dapat menurunkan sekresi asam lambung selama beberapa jam. Kemudian meningkat kembali setelah beberapa lama. Penelitian lainnya menyatakan bahwa akar jahe kering mampu memperkuat lambung, usus halus dan mencegah muntah.

Penelitian terbaru menunjukkan ekstrak aseton dan methanol yang berasal dari jahe memiliki efek yang kuat untuk menghambat terjadinya tukak (luka) pada lambung. Penelitian lainnya menunjukkan bahwa gingerol mampu mengatasi afek toksisitas (keracunan) pada hati dengan jalan meningkatkan

asam empedu.

Selain itu, rupanya, kandungan jahe senyawa oleoresin yang lebih dikenal sebagai gingerol yang bersifat antioksidan, diyakini mampu sebagai komponen bioaktif antipenuaan. Komponen bioaktif jahe dapat berfungsi melindungi lemak/membran dari oksidasi, menghambat oksidasi kolesterol, dan meningkatkan kekebalan tubuh. Berbagai manfaat jahe yang secara tradisional sudah dikenal luas adalah seperti berikut ini:

Obat masuk angin, ramuan: ambil jahe yang tua sebesar ibu jari, cuci bersih dan memarkan lalu direbus dengan air dua gelas, tambahkan gula aren secukupnya. Didihkan lebih kurang 1/4 jam. Angkat dan minum hangat-hangat. Obat sakit kepala atau migrain (sakit kepala sebelah), ramuan: ambil jahe seibu jari, bakar lalu memarkan. Seduh dengan segelas air dan beri sedikit gula aren, minum sekaligus. Minum tiga kali sehari.

Obat Mencegah mabuk kendaraan, ramuan: ambil jahe seibu jari, cuci dan iris tipis-tipis, lalu rebus dengan segelas air. Diminum hangat-hangat sebelum naik kendaraan. Obat Terkilir, ramuan: ambil jahe lebih kurang dua ruas. Cuci bersih lalu parut, tambahkan sedikit garam. Balurkan ramuan ini pada anggota tubuh yang terkilir. Lakukan dua kali sehari. Bercak putih pada kulit karena kehilangan pigmen (vitiligo), ramuan: ambil 30 gr jahe, cuci bersih lalu dijus. Balurkan jus pada kulit yang menderita vitiligo tersebut.

Obat mengatasi cacing gelang, ramuan: ambil 60 gr jahe segar lalu cuci bersih. Lumatkan, campur dengan segelas air. Saring dan tambahkan madu satu sendok makan. Minum ramuan ini tiga kali sehari. Obat Rematik, ramuan: siapkan satu atau dua rimpang jahe. Panaskan rimpang tersebut di atas api atau bara kemudian tumbuk. Tempel tumbukan jahe pada bagian tubuh yang sakit.

Obat Membuat payudara menjadi montok dan berisi. Ramuannya, masukkan dua ruas jahe segar yang telah dikupas kulitnya, ke dalam segelas susu murni yang panas. Tambahkan satu sendok teh gula. Minumlah menjelang tidur malam setiap hari. Jika anda seorang wanita yang memang ingin terlihat seksi, tidak ada salahnya mencoba resep tradisional ini. Setidaknya tidak perlu melakukan suntik silikon atau nekad menghadang maut seperti melakukan operasi. ▲

teh jahe untuk mengatasi gangguan pencernaan. Sebuah penelitian menyebutkan bahwa minum dua atau tiga cangkir penuh teh jahe dapat mengurangi **gejala gout** (penyakit radang sendi akibat kelebihan asam urat), perut kembung atau gangguan pencernaan (akibat terlalu banyak minum minuman keras). Selain itu jahe juga memiliki khasiat memperlancar peredaran darah.

Pada perkembangan zaman, penelitian modern ternyata tetap mempertahankan jahe sebagai bahan pengobatan. Dari hasil penelitian, ekstrak jahe, baik dari jahe segar maupun jahe kering, berkhasiat dalam mengatasi infeksi bakteri, infeksi jamur, kejang, nyeri, luka serta gangguan lambung, tumor, kram dan reaksi alergi. Ekstrak jahe yang diteliti adalah sesuai standard gingerol, yaitu ekstrak yang tidak kehilangan rasa dan aroma jahe yang tajam. Melalui proses penelitian dengan percobaan tikus, ternyata jahe segar ampuh untuk meredakan nyeri dan infeksi. Percobaan *in vitro* (laboratorium) memperlihatkan



Gold can be worn as jewelry, used as an investment and deployed as a hedge against economic and political risk. It can also serve as the anchor of a country's monetary and exchange-rate policy.

Gold Standard Fans Yearn for Great Depression



Michael R. Sesit ^{*)}

The first is a matter of personal taste. Investments and hedges are often related; their success boils down to the price initially paid for the metal. History shows that as a hedge and investment, bullion over the years has performed both spectacularly and miserably, depending on the time frame.

A return to the gold standard, where countries peg their currencies to a given quantity of the metal and thus to one another, is a bad idea. Gold-based monetary systems are overly rigid and restrictive, possess a deflationary bias and can be volatile. They make long-term inflation dependent on the pace of mining output in places such as China, South Africa and Russia. Bullion-based policies are also as

prone to political manipulation as those not anchored in the metal -- something few gold bugs are willing to acknowledge.

Gold has been on a tear. Futures soared 35 percent from \$705 an ounce on Nov. 13 through March 2. Before retreating, the metal traded as high as \$1,007 on Feb. 20, its first move above the \$1,000 plateau in almost a year.

Extended Recession

The high price reflects investors' concerns that massive deficit spending and ultra-loose monetary policies will reignite inflation. Paradoxically, worries about an extended recession and that policy makers won't succeed in rescuing the global banking system also haunt investors.

Gold is now regarded as a hedge against both inflation and

deflation, says Alan Ruskin, the chief international strategist at Greenwich, Connecticut-based RBS Greenwich Capital Markets Inc. The first is reflected in the high dollar price of bullion, the second by the surge in gold's price in euros.

When gold last traded at more than \$1,000 on March 18, 2008, the metal's price was 643 euros an ounce. Yesterday, it was 743 euros in late European trading. Some folks interpret gold's rally against the dollar at a time the greenback is strengthening against many currencies as a sign of investor disenchantment with fiat, or paper, money -- legal tender with no tangible backing except the good faith of the government that issued it. The risk is that hyperinflation may render it worthless.



'No Safe Store'

"In the absence of the gold standard, there is no way to protect savings from confiscation through inflation. There is no safe store of value," former Federal Reserve Chairman Alan Greenspan wrote in 1966, when he was running consulting firm Townsend-Greenspan & Co. in New York. "This is the shabby secret of the welfare statist's tirades against gold. Deficit spending is simply a scheme for the confiscation of wealth. Gold stands in the way of this insidious process."

Not so fast, Mr. Greenspan.

A gold standard tends to have a recessionary bias. When speculators and others attack a country's currency, the burden usually falls on that nation to adjust by contracting its economy and increasing unemployment. The system places no matching

requirement on countries with "strong" currencies to adjust.

The inflexibility of the gold standard makes it difficult for governments to adopt policies best suited to their domestic economic needs.

Take South Korea. Its currency, the won, has fallen 29 percent against the dollar in the past six months. Such a depreciation wouldn't have been permitted under a gold standard. Korea would have been required to support its currency by raising interest rates to maintain the won's parity with bullion, exacerbating an already virulent recession.

Gold and Depression

In a parable with relevance to today's economic environment, "attachment to the gold standard played a major part in keeping governments from fighting the Great Depression, and was a major factor turning the recession

of 1929-1931 into the Great Depression of 1931-1941," Bradford DeLong, an economist at the University of California, Berkeley, wrote several years ago.

Commitment to the gold standard prevented the Fed from expanding the money supply in 1930 and 1931, forcing President Herbert Hoover "into destructive attempts at budget-balancing in order to avoid a gold-standard generated run on the dollar," DeLong said.

China, the U.S., South Africa, Australia, Russia and Peru make up the six biggest gold producers. If their mining operations were interrupted by, say, political upheaval, it could lead to deflation and rising unemployment. In contrast, major improvements in mining technology could ignite inflation.

Population's Willingness

What's more, a gold standard isn't the panacea its advocates claim. A central bank's ability to adhere to it is only as strong as the population's willingness to endure the pain associated with enforcing the system.

Countries periodically abandoned the gold standard during times of war -- Britain during World War I, for example -- and free-spending Latin American countries were repeatedly forced to exit the system in the late 19th century. The Bretton Woods System collapsed in 1971 when the costs associated with fighting the Vietnam War forced President Richard Nixon to suspend the convertibility of dollars into gold.

If you don't have faith in central bankers or politicians to ride herd over inflation, why would you trust them to keep a country on a gold standard for more than a short period of time? ▲

*) *Bloomberg News columnis*

Cengkih “Hilang” di Pangkal Pinang

Minimnya produksi cengkih petani membuat transaksi komoditas ini menjadi sepi. Padahal seharusnya harga cengkih saat ini justru menjadi daya tarik tersendiri, karena perkasa bertengger di posisi Rp 50 ribu per kg. Dapat dimaklumi terjadi situasi dilematis pada perkebunan cengkih di wilayah pulau berpantai nan elok ini.

Sebagian petani cengkih di wilayah ini memang sudah tidak lagi menggantungkan hidupnya kepada cengkih. Dalam kenyataannya, perkebunan cengkih di Pulau Bangka telah beralih fungsi menjadi perkebunan karet atau sawit. Kondisi inilah yang semakin mengendurkan volume produksi cengkih di daerah ini. ▲

Harga Gandum Merangkak Naik

Harga gandum di pasar global sedang mengalami kenaikan. Lonjakan harga ini antara lain dipicu masalah kekeringan yang melanda Australia, sebagai produsen gandum keempat di dunia. Kondisi cuaca yang kurang bersahabat di negara kanguru ini, memicu fluktuasi harga gandum internasional. Meski demikian, pihak Australia melalui Duta Besar Australia untuk Indonesia, Bill Farmer menyatakan pihaknya tetap menjunjung komitmen kerja sama perdagangan dengan Indonesia, sehingga menjamin pengiriman pasokan gandum ke tanah air.

Berbeda dengan Indonesia yang menanti pasokan gandum dari Australia, Korea Selatan malah mengimpor gandum asal Ukraina. Korsel yang merupakan negara pengimpor biji-biji-bijian terbesar kedua di Asia ini akan menambah volume impor gandum sekitar 25 persen dari Ukraina sebagai pengganti jagung dari Amerika Serikat. Dan tentu saja dengan pertimbangan pengeluaran



biaya yang jauh lebih murah. Ukraina sendiri memang sedang mengalami musim panen gandum. Volume produksi yang berlebih, diperkirakan menjadi daya tarik tersendiri bagi para importir Asia.

Harga gandum di pasar internasional juga memperlihatkan lonjakan setelah memburuknya kondisi panen di Kansas. Harga gandum untuk pengiriman Mei dalam perdagangan elektronik di Chicago Board of Trade meningkat sebesar 0,6 persen ke level 5,1550 per bushel. ▲

Stok Kakao Defisit Harga Melejit

Setelah sebelumnya harga kakao sempat mengalami penurunan, kini dilaporkan jika bakal ada titik pencerahan. Sebab defisit stok kakao dunia, diprediksi mampu mengembalikan kejayaan komoditas ini. Memang, menjelang akhir Maret lalu harga kontrak berjangka kakao melorot di bursa New York. Kondisi ini dipicu dominasi dolar AS terhadap poundsterling, serta adanya koreksi terhadap pasar saham. Bahkan sebelumnya, harga kakao ini sempat terkapar pada posisi terendah di level 2.515 dolar AS pada Maret lalu.

Data Bank Dunia mencatat, pada Juli 2008 lalu harga kakao terus menyajikan penurunan hingga September dan mencoba bertahan pada level 2.696 dolar AS per ton. Kemudian Januari 2009, harga kakao bahkan tampak putus asa di level 2.200 dolar AS per ton.

Tetapi saat ini, terjadi perubahan yang cukup dramatis bagi komoditas kakao. Jika sebelumnya kakao juga sempat menorehkan prestasi buruk di pasar dunia dengan terpuruk di level 2.300 dolar AS per ton, kini defisit stok penyelamatkannya. Defisit kakao dunia yang diproduksi mencapai 100 ribu ton ini diperkirakan mampu menaikkan harga kakao menjadi 2.600 dolar AS per ton.

Menurut Ketua Umum Asosiasi Kakao Indonesia (Askindo), Halim Razak, meski permintaan kakao menurun akibat krisis global, tetapi melorotnya volume produksi juga jauh meluncur dibawah garis permintaan. Hal ini tentu memungkinkan untuk terjadi lonjakan harga. Harga kakao di tingkat petani sendiri mencapai Rp 26.ribu per kg. Pada pertengahan Februari lalu harga kakao sempat memberikan kejutan menyenangkan dengan bertahan di posisi harga antara Rp 27 ribu hingga Rp 28 ribu per kg. Sayangnya pada akhir Maret, harga kakao malah terjungkal hingga ke posisi Rp 22.600 per kg.

Meski harga kakao turun-naik, tetapi ekspor kakao Indonesia saat ini terbesar kedua setelah Pantai Gading. Sementara negara tujuannya antara lain AS dan Uni Eropa. ▲

Jelang Pasar Lelang CPO

Juni 2009, mendatang, PT Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) merencanakan akan menghadirkan pasar lelang fisik minyak sawit mentah (crude palm oil- CPO). Diharapkan segera terbentuk referensi harga, sehingga Indonesia tidak lagi “berkiblat” pada bursa komoditas luar negeri. Mampukah?

Direktur BBJ Edi Susmadi, mengatakan, peluncuran pasar lelang CPO pada Juni 2009 mendatang, tidak terlepas dari tujuan untuk memajukan bursa berjangka komoditas. Serta upaya menggairahkan aktivitas di bursa serta meningkatkan kepercayaan investor kepada BBJ. Tetapi yang jelas dari kegiatan ini tentu akan terbentuk referensi harga sebagai rujukan nasional. Karena faktanya, ironis yang terjadi selama ini. Meski Indonesia merupakan negara produsen CPO terbesar di dunia, referensi harga CPO justru “berkiblat” ke bursa komoditas Malaysia dan Rotterdam, Belanda.

“Sejauh ini persiapan pelaksanaan pasar lelang fisik CPO sudah rampung sekitar 70 persen. Simulasi terpadu juga telah dilakukan, disamping pengenalan terhadap sistem yang akan digunakan,” kata Susmadi.

Pasar lelang fisik CPO BBJ merupakan kegiatan transaksi jual beli secara elektronik untuk komoditas CPO. Sistem khusus yang digunakan dalam transaksi ini dinamakan *cilantro*, fasilitas perdagangan yang telah dimiliki BBJ. Rencana BBJ terhadap penyelenggaraan pasar lelang ini, juga datang dari berbagai pihak yang membidangi usaha CPO di dalam negeri. Masing-masing yakni, PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I-VIII, PTPN XIII dan PTPN XIV dan PT Rajawali Nusantara





Indonesia (RNI). Kesebelas perusahaan tersebut nantinya akan menjadi pihak penjual dalam pasar lelang ini. Dan PTPN dalam hal ini sebagai pelopor, selanjutnya diharapkan pasar lelang ini juga menjangkit minat dari pihak perusahaan swasta.

Lebih jauh dijelaskan Edi Susmadi, pihak PTP Nusantara akan mengalokasikan sekitar 20 persen dari total produksi CPO. Jika total produksinya sebesar 2,4 juta ton, maka diperkirakan alokasi produksi untuk di pasarkan dengan sistem lelang itu sebanyak 480 ribu ton CPO.

Sementara itu, dalam penyelenggaraan lelang BBJ menetapkan transaksi 1 lot sama dengan 500 ton. Tetapi jika sistem yang dijalankan berjalan dengan baik seperti yang diharapkan, maka dimungkinkan jumlah alokasi produksi tersebut akan bertambah. Apalagi produksi nasional CPO memang menjanjikan. Tercatat, produksi CPO mencapai 18,9 juta ton pada periode tahun produksi dari Oktober 2007 hingga September 2008. Dan pada periode lanjutan, dari Oktober

2008 hingga September 2009 nanti bahkan produksi CPO diprediksi melejit menjadi 20,2 juta ton.

Harga Tinggi

Saat ini harga CPO memang sedang meroket tajam. Dari Malaysia dilaporkan, harga komoditas ini menunjukkan tren positif dengan sukses di level 2.265 Ringgit Malaysia per ton. Harga tersebut relatif sama juga di Rotterdam atau di bawah 700 dolar Amerika per ton. Kondisi ini tentu memicu ekspor CPO dalam negeri, dan jelas menguntungkan Indonesia sebagai negara produsen terbesarnya. Kedepannya, keluar rencana pihak pemerintah untuk merevisi ketentuan bea keluar (BK) CPO melalui penurunan patokan ekspor dari 700 dolar Amerika per ton menjadi 550 dolar Amerika per ton. Tarif BK CPO akan ditetapkan sebesar 025 persen ketika harga rata-rata harganya di atas 550 dolar Amerika per ton di CIF Rotterdam.

Sementara pungutan progresif saat ini sebesar

0 persen pada saat harga lebih kecil atau sama dengan 700 per ton, ketentuan ini berdasarkan PMK No. 159/PMK.011/2008. Menurut Deputi enko Perekonomian Bidang Kelautan dan Pertanian, Bayu Krisnamurthi, kemungkinan harga patokan akan menjadi 600 dolar AS per ton atau 650 dolar AS per ton untuk menentukan bea keluar saat ini sebesar 700 dolar AS per ton tersebut. Bea keluar terhadap CPO dengan batas harga patokan di bawah 700 dolar AS per ton itu untuk mengendalikan ekspor CPO demi mengamankan industri dalam negeri.

Proteksi tersebut dilakukan, mengingat eksportir nampaknya lebih cenderung bernafsu menjual CPO ke luar negeri ketimbang memasok kebutuhan industri lokal. Apalagi kondisi krisis global saat ini telah membuat negara-negara konsumen seperti India rela menerapkan kebijakan counter trade sehingga bebas bea masuk CPO, padahal saat ini kurs dolar bertengger dikisaran Rp 11 ribu hingga Rp 12 ribu. ▲

Akar Krisis Global

Memiliki mobil atau rumah tidak selamanya harus dengan uang tunai, tetapi bisa dengan mencicil. Bahkan tidak sedikit orang yang memiliki televisi karena mencicil. Jangan kecil hati, kebiasaan mencicil sudah berlangsung sejak lama di dunia dengan mengandalkan pembayaran dari gaji tetap. Hanya orang mapan dan superkaya saja yang bisa membeli segala kebutuhan dengan uang tunai. Namun sayangnya, seperti ditunjukkan dari hasil penelitian Gemini Capital dan Merrill Lynch, setiap tahun kekayaan di dunia ini tidak terbagi rata di antara tujuh miliar penduduk dunia. Bahkan, ketidakmerataan itu begitu timpang.

Hampir semua kegiatan mencicil seperti itu berjalan lancar, tetapi tentu ada sebagian yang macet. Tidak terdengar kebangkrutan massal perusahaan keuangan secara global sejak 1930-an. Ada sejumlah kasus kehancuran sistem keuangan di beberapa negara dalam beberapa dekade terakhir, namun tidak sampai memberi efek domino kebangkrutan massal seperti sekarang.

Bukti lain, Presiden Bank Dunia, Robert Zoellick dan Direktur Pelaksana IMF, Dominique Strauss-Kahn, mengatakan, tak pernah ada pertumbuhan ekonomi dunia yang negatif sejak Depresi Besar 1929. Artinya, kegiatan pinjam-meminjam relatif lancar saja. Paul Krugman dan Joseph E Stiglitz, dua ekonom Amerika peraih nobel ekonomi, mengatakan, ada regulasi yang membuat bank-bank dan lembaga keuangan memberi kredit dengan rambu-rambu yang aman. Jika sebagian kredit yang dikucurkan macet, ada perusahaan asuransi yang menjamin kemacetan itu, atau bank itu sendiri punya cadangan untuk mengompensasi kredit macet. Jika bank-bank itu bangkrut sekalian, ada perusahaan yang menjamin deposito nasabah, seperti *Federal Deposit Insurance Corporation* (FDIC) di Amerika Serikat dan itu pun juga ada di Indonesia.

Dengan sistem seperti itu, konsumen, nasabah, dan perbankan sama-sama merasa aman dengan kegiatan saling meminjamkan, termasuk kegiatan meminjamkan ke perusahaan. Dari proses pinjam-meminjam ini terjadilah permintaan, yang menjadi inti pendorong aktivitas perekonomian. Bahkan perbankan bersedia memberi kartu kredit kepada miliaran penduduk dunia, yang semakin mendorong permintaan dan kemampuan berbelanja.

Sekarang kegiatan seperti itu terganggu untuk sementara kecuali untuk konsumen dan perusahaan yang benar-benar dianggap aman. Konsumen tidak dipercaya, atau tidak memiliki daya beli sebagian karena sudah di-PHK. Banyak bank tidak punya dana, bahkan sudah bangkrut dan ini terjadi pada bank-bank kaliber dunia

bernama besar seperti UBS, Citigroup, ABN-AMRO yang sudah almarhum dan lainnya. Jika ada bank yang punya dana, ada keraguan mengucurkannya.

Hal ini mengganggu transaksi ekonomi, yang intinya mengganggu proses permintaan dan penawaran. Anjloknya permintaan membuyarkan penjualan mobil buatan GM, Fords, Toyota, Honda dan lainnya. Hampir semua kategori produk kini mengalami penurunan penjualan, apalagi barang-barang luks. Sebagian kartu kredit pun kini sudah sekadar kartu yang tak berdaya beli lagi.

Runtuhnya Kepercayaan

Mengapa? Orang terkaya nomor dua di dunia dan jago investasi, Warren Buffet, mengatakan, kepercayaan adalah bagian dari sistem. Dan sistem tidak akan bekerja dan tanpa adanya kepercayaan. Buffet menambahkan, ketiadaan kepercayaan itu *contagious*, menular dan menyebar ke seluruh sektor dengan daya rusak yang besar.

Bukan hanya konsumen yang tak dipercaya, bukan hanya bank yang diragukan keamanannya. Penurunan penjualan membuat sejumlah perusahaan yang menjual saham, dan obligasi di bursa, mengalami penurunan harga-harga saham dan obligasi.

Investor di bursa tidak lagi terlalu percaya membeli saham dari perusahaan kaliber dunia sekalipun karena persepsi akan terjadi kebangkrutan. Berjatuhanlah indeks-indeks saham.

Tetapi tetap ada kegiatan di bursa hingga sekarang, namun pelakunya bukan lagi investor konservatif tetapi investor spekulatif yang ternyata bisa tetap meraih untung dari krisis.

Mengapa keadaan sekacau itu? Kegiatan *shadowy banking*, "bank-bank gelap", meraja lela dalam 25 tahun terakhir.

Michael Hiltzik, kolumnis di harian *The Los Angeles Times*, Amerika Serikat, pada 12 Maret 2009, menuliskan terjadi cerita horor dalam sistem keuangan. Walau dikatakan bank-bank gelap, tetapi perusahaannya tidak gelap. Lehman Brothers adalah perusahaan resmi di Amerika berusia di atas 150 tahun, namun berperan liar layaknya bank-bank gelap. Lehman Brothers, yang pernah menjadi konsultan Indonesia di masa krisis tahun 1998 lalu, antara lain memanfaatkan aliran dana murah dari Asia, dan dari sejumlah negara kaya di dunia (SWF) yang masuk ke Amerika Serikat.

"Bank-bank" gelap yang tidak diatur negara ini mengalirkan dana ke konsumen, perusahaan di luar kemampuan daya bayar di kemudian hari. Pemerintahan Amerika Serikat di bawah George W Bush tidak berminat mengatur aktivitas perusahaan seperti ini, walau sudah diperingatkan akan ada potensi bahaya.

Bukan hanya Lehman Brothers yang terlibat kegiatan seperti ini tetapi sejumlah bank dan perusahaan besar dan resmi lainnya di Amerika, Inggris, Jerman, Swiss dan banyak lagi bank lainnya. Bank-bank global tidak melakukan kegiatan liar ini secara langsung, namun melakukannya lewat anak perusahaan yang bukan bernama bank.

Bahkan AIG, perusahaan asuransi terbesar dunia asal Amerika Serikat pun sudah mirip spekulasi. Bahkan, bukan lagi sekadar bank gelap, sebagaimana dikatakan Gubernur Bank Sentral Amerika Serikat, Ben Bernanke.

Kegiatan bank-bank gelap ini, menurut Paul Krugman, lebih besar dari kegiatan bank-bank konvensional dengan omset perputaran uang sekitar 10 triliun dollar AS. Ini adalah jumlah yang dahsyat.

Mereka menggantikan peran utama bank konvensional, dan menjadi saluran utama untuk proses pinjaman meminjam di Amerika Serikat. Semakin banyak kredit bisa dikucurkan, semakin banyak pula bonus didapat para karyawan. Tidak peduli apakah kredit itu bisa dikembalikan kemudian hari. Bonus tidak didasarkan pada kinerja keuangan perusahaan tetapi kemampuan menyalurkan kredit.

Bank-bank gelap ini pun berperan menjual dan menjamin obligasi yang diterbitkan berbagai perusahaan resmi untuk keperluan modal. Di sisi lain banyak investor yang tergiur membeli obligasi yang ditawarkan dan dijamin bank-bank gelap ini. Siapa yang tidak percaya dengan jaminan Lehman Brothers, yang juga didukung dengan peringkat AAA yang diberikan Standard & Poor's, lembaga pemeringkat terkenal itu

Produk Derivatif

Lebih jauh lagi, bermunculan produk-produk keuangan, yang dinamakan produk-produk derivatif. Produk ini dikatakan sebagai hasil inovasi keuangan, dan ditawarkan sebagai sarana berinvestasi bagi para warga kaya di dunia.

Media di Amerika menjulukinya bukan inovasi tetapi *corporate greed*, kerakusan korporasi.

Lewat produk-produk derivatif ini, bank-bank gelap menjual surat berharga. Di Indonesia hal ini juga beredar, yakni surat berharga terbitan Lehman Brothers yang dijual lewat Citibank Indonesia. Hasilnya, miliaran dana warga kaya Indonesia lenyap lewat Citibank. Salah satu contoh kecerobohan bank-bank gelap itu, sekitar 1,2 juta warga di Amerika Serikat, misalnya bisa dapat rumah seharga rata-rata 120.000 dollar Amerika dari kredit, yang tidak didukung pendapatan untuk mencicil kemudian hari.

Ini dimungkinkan karena ada aliran dana berlimpah masuk, ditambah ketertarikan para investor, termasuk perusahaan dana pensiunan resmi milik negara, dari Singapura, Norwegia, Timur Tengah, Rusia, yang tergiur dengan iming-iming untung besar dari sektor perumahan Amerika, dan permainan spekulatif di bursa.

Sebagaimana dikatakan mantan Gubernur Bank Sentral Amerika Serikat, Alan Greenspan, dekade 2000-an, Asia yang kaya devisa menjadi sumber pendanaan ekonomi Amerika Serikat.

Masalah terjadi bukan hanya karena kucuran kredit berlebihan tanpa rambu-rambu, tetapi pengaman dari lembaga keuangan itu masih kurang ketat.

Bank-bank gelap itu juga turut serta berspekulasi di bursa uang dan modal dan menurut Ben Bernanke berperan seperti "*hedge fund*", konotasi untuk penjudi kerah putih. Aliran dana-dana itu juga dimainkan di bursa. Salah satu yang terkenal adalah dengan me-

ngerek harga komoditas menjadi tinggi seperti harga kedelai, minyak, dan lainnya di bursa komoditas, sebagaimana pernah dikatakan Steve Forbes, pemilik majalah Forbes. Masih ingat 'kan, kenaikan harga-harga komoditas mendadak di akhir 2007 hingga awal 2008?

Lalu setelah harga tinggi, si pemain menjual komoditas miliknya, dan meraih untung tinggi. Kerusakan lain terjadi, warga di dunia dipaksa membeli harga pangan tinggi.

Meraih Untung Tanpa Keringat

Inti persoalan, para eksekutif keuangan, terutama di *Wall Street*, telah meraup keuntungan dari aliran dana masuk ke Amerika Serikat. Tidak dengan mengandalkan keuntungan perusahaan, tetapi dengan menelan dana itu sendiri dengan mengorbankan para nasabahnya, termasuk para pemberi pinjaman.

CEO JP Morgan Chase, Jamie Dimon, di New York, mengakui perilaku seperti itu telah mengacaukan sistem keuangan.

CEO HSBC Stephen Green, juga mengakui, kekacauan pada perilaku dan etika sistem perbankan telah menjadi sumber kekacauan.

Berapa banyak dana yang lenyap karena kekacauan seperti itu? Hiltzik mengatakan sekitar 1,2 triliun dollar Amerika lenyap di perumahan Amerika Serikat yang tak laku terjual.

Krugman mengatakan ada 10 triliun dollar Amerika dana-dana yang diputar di bank-bank gelap. Dana itu tidak diketahui lagi juntrungannya, dan entah dimana berada. Hal yang pasti, dalam jajaran warga terkaya di Amerika, pada umumnya adalah jago-gajo teknologi informasi dan "*hedge fund*".

Jika dunia telah kehilangan dana 10 triliun dollar Amerika, bayangkan apa yang terjadi untuk dunia dengan besaran produksi domestik bruto (PDB) 60 triliun dollar Amerika?

Lalu bagaimana memulihkan ekonomi dunia. Gubernur Bank Sentral Amerika, Ben Bernanke, mengatakan, ekonomi tak pulih jika sistem keuangan kacau. Sistem keuangan yang kacau tidak akan bisa menjadi lembaga intermediasi sebagaimana layaknya.

Bagaimana memulihkan sistem keuangan? Hal ini hanya bisa terjadi jika ada investor yang mau membeli bank-bank dengan segala *toxic assets*-aset-aset beracun.

Seperti kata Buffet, kepercayaan yang hilang telah membuat investor kaya menghindar membeli bank-bank atau lembaga keuangan rusak. Buffet sendiri, yang nomor dua terkaya dunia pun, tidak mau dan bahkan tidak mampu membeli aset-aset rusak itu.

Jika aset rusak ini tidak dibeli investor, maka stimulus ekonomi yang diluncurkan berbagai negara tidak akan mampu menyelamatkan ekonomi. Jumlah stimulus di dunia sekarang ini hanya sekitar 3,5 triliun dollar Amerika, itu pun jika benar ada.

Jumlah uang lenyap akibat kekacauan di bursa sebagai buntut lain kekacauan yang dihasilkan dari perilaku buruk eksekutif di *Wall Street* sekitar 50 triliun dollar Amerika. Ini adalah data dari Bank Pembangunan Asia. Ini termasuk nilai kekayaan dunia yang lenyap akibat kejatuhan indeks-indeks di bursa global, bukan saja di Amerika Serikat.

CEO Blackstone Group, LP Stephen Schwarzman, di New York, mengatakan, sekitar 45 persen kekayaan dunia rusak akibat krisis kredit global.

Lalu kapan krisis akan selesai. "Kita tidak tahu pasti. Saya mengharapkan kita semua mendapatkan keberuntungan," kata Krugman di *National Press Club*, Washington, Desember 2008 lalu. Ini adalah pernyataan yang merefleksikan dalamnya persoalan, yang tidak bisa diprediksi kapan dan bagaimana menyelesaikannya. ▲

*) Simon Saragih, Kompas



Praktik Perdagangan Yang Dilarang

Perdagangan berjangka sebagai kegiatan bisnis berisiko tinggi, perlu diatur secara ketat. Pengaturan itu antara lain menegaskan pelarangan sejumlah praktik yang menyimpang. Apa saja?

Agar kegiatan perdagangan berjangka komoditi berjalan sesuai fungsinya, yaitu sebagai sarana untuk lindung nilai, pembentukan harga yang transparan dan sarana investasi, maka perlu dibuat peraturan yang dilaksanakan secara ketat. Dan, semua peserta dalam perdagangan berjangka diwajibkan mematuhi rambu-rambu itu, baik yang ditetapkan melalui undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan badan pengawas, peraturan bursa dan lembaga kliring. Maupun, etika yang ditetapkan oleh asosiasi profesi di bidang perdagangan berjangka.

Diantara perangkat peraturan-peraturan tersebut, masalah perilaku professional dalam perdagangan sangat penting. Mengingat para nasabah kedudukannya sangat lemah, sehingga perlu ada perlindungan yang memadai. Berikut ini adalah beberapa praktik perdagangan yang dilarang.

Bucketing

Pialang/Wakil Pialang di lantai bursa secara langsung atau tidak langsung mengambil posisi di balik posisi amanat nasabah yang dilaksanakannya, untuk rekening pialang itu sendiri atau untuk rekening pihak lain di mana dia mempunyai kepentingan (interest). Praktik semacam inilah yang banyak dilakukan oleh pialang-pialang illegal, yang akibatnya banyak merugikan masyarakat. Kegiatan ini tidak hanya telah menipu para nasabah, tapi pada gilirannya akan menu-

runkan integritas perdagangan berjangka karena hilangnya kepercayaan masyarakat kepada perdagangan berjangka.

Contoh Bucketing:

- a. Langsung. Pialang B beli untuk rekening pialang A dari pialang A yang menjual untuk rekening nasabahnya. Atau, pialang A beli untuk rekeningnya sendiri dari pialang B, yang menjual untuk rekening yang dipesan pialang A (nasabah A).
- b. Tidak Langsung. Pialang A beli untuk rekening nasabahnya dari pialang B yang menjual untuk rekening sendiri. Pada saat yang sama, pialang A juga menjual untuk rekening sendiri kepada pialang B untuk rekening sendiri. Atau, pialang A untuk rekening nasabahnya beli dari pedagang B untuk rekening sendiri, dan pialang C jual untuk rekening sendiri kepada pialang B untuk rekening sendiri (dalam scenario ini A dan C satu grup).

Trading a Head of Customer

Pialang melakukan transaksi untuk dirinya atau pihak dimana pialang tersebut mempunyai kepentingan terlebih dahulu, transaksi amanat nasabah dibelakangkan. Bagi pialang yang mempunyai amanat nasabah ditangannya dengan kondisi "market order" atau harga yang sama, harus memprioritaskan amanat nasabah.

Matching Orders

Praktik yang dilakukan pialang mengawainkan amanat beli dari seorang na-

sabah dengan amanat jual dari nasabah lainnya, dan melaporkan pelaksanaannya sebagai suatu transaksi yang benar sesuai dengan peraturan dan tata tertib bursa, padahal tidak dilakukan secara terbuka dan bersaing di Bursa.

Apabila seorang pialang mempunyai amanat beli dari seorang nasabah, dan mempunyai amanat jual dari nasabah lainnya dengan kontrak, bulan dan harga yang sama, dia tidak dapat begitu saja mengawainkan langsung (matching) amanat tersebut, kecuali telah menawarkan secara terbuka dan secara bersaing di lantai bursa pada tingkat harga yang sama, dengan menyebutkan jumlah kontrak dan harga sekurang-kurangnya 3 kali dengan periode waktu yang cukup untuk memberikan kemungkinan pihak lain menyambut tawaran tersebut.

Prearranged Trading

Penjualan atau pembelian Kontrak Berjangka di Bursa yang sudah diatur sebelumnya, kecuali transaksi yang dinamakan EFP atau exchange for physical, yaitu pertukaran dari transaksi komoditi fisik dengan kontrak berjangka sebagaimana diatur dalam peraturan dan tata tertib Bursa Berjangka.

With Holding Orders

Anggota bursa dilarang menahan amanat atau menarik amanat yang harus ditawarkan di pasar untuk keuntungannya sendiri atau untuk memberi kemudahan atau peluang bagi anggota lain. Bagi amanat yang datang duluan harus didahulukan pelaksanaan transaksinya kecuali harga yang diinginkan belum tercapai.

Disclosing Orders

Seorang anggota bursa tidak boleh membuka amanat nasabah yang akan ditransaksikannya kepada pihak lain, kecuali kepada pegawai bursa atau antara pedagang/anggota yang berada di bawah perusahaan yang sama.

Amanat Pembelian dan Penjualan Simultan dari Nasabah yang Sama. Anggota bursa tidak boleh menerima amanat jual

dan amanat beli dari seorang nasabah, untuk Kontrak Berjangka dan bulan penyerahan yang sama.

Wash Trading

Transaksi yang menampilkan penjualan dan pembelian benar-benar telah terjadi, tetapi dalam kenyataannya yang bersangkutan tidak mengambil satu posisi di pasar. Transaksi seperti ini biasanya tidak menghasilkan suatu perubahan pada posisi para pedagang di pasar. Meskipun telah terjadi banyak transaksi di pasar, tapi tidak terjadi perubahan kepemilikan kontrak terbuka atau open interest dari transaksi tersebut adalah nol. Contoh:

- Trader A jual pada trader B, dan trader B jual pada trader A.
- Trader A jual pada trader B, dan trader B jual pada trader C.
- Trader c jual pada trader A.

Churning

Perdagangan yang berlebihan, baik dalam jumlah atau frekuensi yang biasanya dilakukan pada rekening bebas (discretionary account), yaitu rekening yang diberi kuasa kepada pialang atau penasihat berjangka untuk melakukan transaksi tanpa melalui perintah pemilik rekening yang bersangkutan. Tujuannya, melipat gandakan komisi tanpa memperhatikan kepentingan nasabah pemilik rekening tersebut. Meskipun kadang-kadang tampak nasabah tidak dirugikan dalam transaksi tetapi dalam kenyataannya dirugikan dari pembayaran komisi berkali-kali.

Allocation Schemes

Praktik perdagangan dengan melakukan beberapa transaksi tidak untuk rekening tertentu atau disebut spesifik. Pada beberapa waktu kemudian, transaksi-transaksi tersebut dialokasikan kepada rekening-rekening tertentu yang diuntungkan atau dipilihnya dengan memberinya transaksi terbaik dari transaksi yang telah dilakukan.

Manipulasi Pasar.

Kegiatan-kegiatan manipulasi, percoobaan atau usaha-usaha mengarah kepada manipulasi baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat pada perubahan harga yang tidak wajar seperti:

- a. Menyudutkan pasar atau mengontrol suatu komoditi atau kontrak berjangka, yang jumlahnya relatif dapat memanipulasi harga. Dalam situasi ekstrim menguasai kontrak beli yang akan jatuh tempo melebihi dari jumlah komoditi yang siap diserahkan.
- b. Membuat, menyebarkan secara langsung atau tidak langsung pernyataan atau laporan palsu/menyesatkan atau laporan perdagangan yang bersifat fiktif yang dapat menimbulkan gejolak harga.
- c. Melakukan transaksi fiktif dengan membeli dan menjual kontrak berjangka secara artificial, seolah-olah perdagangan sangat aktif untuk mempengaruhi pihak lain dengan menciptakan informasi yang tidak benar atau terjadinya pembentukan harga yang tidak wajar.
- d. Mengadakan persekongkolan untuk memanipulasi harga suatu komoditi.

Penipuan

Menipu atau berusaha menipu pihak lain dengan cara seperti:

- a. Mengorganisir atau menyediakan fasilitas transaksi perdagangan kontrak berjangka secara illegal dan tidak benar atau bersifat artificial.
- b. Melakukan persekongkolan jahat untuk menipu nasabah.
- c. Melakukan transaksi tidak berdasarkan perintah nasabah.
- d. Menyalahgunakan dana nasabah untuk keperluan di luar transaksi.
- e. Melakukan penjualan atau promosi dengan cara-cara yang bersifat memberi janji-janji keuntungan untuk mempengaruhi calon nasabah agar bertransaksi kontrak berjangka.

Insider Trading

Transaksi kontrak berjangka dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai akses terhadap informasi pihak lain, baik karena jabatan atau karena terlibat dalam penyidikan suatu kasus. Pihak tertentu memanfaatkan informasi tersebut untuk mengambil keuntungan bagi diri sendiri atau pihak lain yang terafiliasi atau dia mempunyai kepentingan. Termasuk orang dalam adalah pegawai Bursa, pegawai Lembaga Kliring Berjangka dan pegawai Bappebti

dan lain-lain yang mendapat informasi dimaksud.

Position Limit and Reportable Position

Menguasai batas maksimum kontrak terbuka atau speculative limit position, yaitu batas yang tidak boleh dilampaui oleh seseorang baik untuk 1 bulan penyerahan atau untuk seluruh bulan penyerahan, kecuali yang bersangkutan secara khusus diizinkan oleh peraturan perundangan yang berlaku. Satu pihak yang secara sungguh-sungguh bertindak sebagai pelaku lindung nilai atau hedger, dibenarkan melampaui batas tersebut dengan memenuhi prosedur yang ditetapkan oleh Bursa atau Badan Pengawas.

Bursa dan Bappebti menetapkan suatu batas maksimum posisi kontrak berjangka dimaksud. Disamping itu, untuk mencegah terjadinya manipulasi dan pelanggaran ini, juga ditetapkan batas wajib lapor (reportable position) dimana setiap pihak yang mencapai batas tersebut wajib melaporkan posisi terakhirnya setiap hari kepada Bursa atau Badan Pengawas sampai posisinya turun dibawah posisi wajib lapor.

Batas posisi maksimum dan batas wajib lapor kontrak terbuka dihitung dari satu rekening nasabah atau penjumlahan dari beberapa rekening yang saling terafiliasi.

Lain-lain

Di samping yang telah disebutkan di atas, banyak larangan lain yang tidak boleh dilakukan oleh seorang anggota bursa atau pialang, antara lain:

- a. Tawar menawar atau bertransaksi dilakukan di luar batas rentang harga (price range).
- b. Lalai memberi konfirmasi kepada nasabah.
- c. Tidak melaporkan perubahan harga terakhir.
- d. Gagal menjawab segala protes atau tuntutan nasabah secara rinci.
- e. Membuat rumor yang menurunkan integritas kontrak atau nama baik bursa. ▲



DEPARTEMEN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA



Bappebti

Gedung
Baru
2009



Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
Departemen Perdagangan

Jl. Kramat Raya No. 172 Jakarta Pusat
Telp. 021. 319 24744 (hunting) ● www.bappebti.go.id